

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202166566, 18 November 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Rusman Rasyid., S.Pd., M.Pd.**
Alamat : Sidomulyo, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua ,
Pinrang, SULAWESI SELATAN, 91253
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Rusman Rasyid., S.Pd., M.Pd.**
Alamat : Sidomulyo, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua ,
Pinrang, SULAWESI SELATAN, 91253
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Karakteristik Masyarakat Miskin Kota**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 12 Januari 2015, di Kota Makassar
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000299344

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



Karakteristik Masyarakat Miskin Kota



Rusman Rasyid, S.Pd., M.Pd.

Rusman Rasyid, S.Pd., M.Pd.

Karakteristik Masyarakat Miskin Kota

2015

BIODATA PENULIS



Rusman Rasyid lahir di Sidomulyo Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 Oktober 1986 dari sebuah keluarga kecil pasangan P. Abd. Rasyid dan P. Nurasia. Memulai pendidikan formal pada tahun 1993 di SDN 29 Duampanua Pinrang dan tamat pada tahun 1999. kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2002.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang Namun pada tahun 2003 pindah sekolah di SMA Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SPMB dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar dan tamat sebagai Wisudawan Terbaik UNM tahun 2009. Pada tahun yang sama melanjutkan studi di Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) konsentrasi Pendidikan Geografi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Sejak tahun 2012 sampai sekarang menjadi Tenaga Edukatif (Dosen) pada program studi Pendidikan Geografi Universitas Khairun Ternate Propinsi Maluku Utara dengan tugas mengasuh matakuliah Geografi Penduduk, Geografi Sosial, Teknik Demografi dan Geografi Ekonomi. Selama menjadi dosen, penulis aktif dalam menulis beberapa karya ilmiah dan dipublikasikan baik melalui jurnal ilmiah maupun melalui prosiding nasional dan internasional, beberapa diantaranya *Analisis Kemiskinan di Kota Makassar (2013)*, *Analisis Pola Kemiskinan Masyarakat Bandar Makassar Negeri Sulawesi Selatan (2014)*, *Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara (2014)* dan *Analisis Karakteristik dan Tingkat Kekumuhan Pada Permukiman Kumuh Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara (2015)*.



Judul : Karakteristik Masyarakat Miskin Kota
Penulis : Rusman Rasyid, S.Pd., M.Pd.
Mitra : Global Research and Consulting Institute
(Global-RCI)

Penyunting : Ahmad Ansar, S.Pd., M.Sc.
Perancang Sampul : Iswan, S.Pd.
Penata Letak : Riswan Arizona Budhi
Isi : Sepenuhnya tanggung jawab penulis

Diterbitkan Oleh:
PUSTAKA RAMADHAN
Anggota IKAPI Jabar No. 065/JBA
Jl. Purwakarta No. 204 Bandung 40291, Indonesia
Telp/Fax: 022-7270186

ISBN 979-604-154-x

Cetakan Pertama, Januari 2015
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Karakteristik Masyarakat Miskin Kota

Oleh: Rusman Rasyid, S.Pd. M.Pd.

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku,
P. Abd. Rasyid (Ayah) dan P.
Nurasia (Ibu)

Istriku Tersayang
Andi Tenri Pada Agustang

Kedua Mertuaku,
Andi Agustang dan Andi
Syamsiar

Kelima Adiku

MOTTO

*Jangan Menyerah atas Impianmu Sebab
Impian Memberikanmu Tujuan Hidup,
Ingatlah Kesuksesan Bukan Kunci
Kebahagiaan tetapi Kebahagiaanlah yang
Menjadi Kunci Kesuksesan*

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan yang kompleks dan kontradiktif. Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Indikasi kemiskinan dicirikan oleh berbagai dimensi baik dimensi sosial maupun ekonomi yang lebih beragam serta memiliki kebijakan yang rumit. Seiring dengan Perkembangan Kota Makassar yang relatif cepat beberapa tahun terakhir ini menyebabkan kota ini menjadi daerah tujuan migrasi penduduk dari beberapa kota lainnya di wilayah Indonesia Timur sehingga memiliki tingkat perkembangan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini memiliki implikasi terhadap peningkatan masyarakat miskin. Sebenarnya berbagai usaha penanggulangan kemiskinan telah dilakukan di Kota Makassar seperti Program Makassar Bebas, namun usaha tersebut belum sepenuhnya sensitif dan berintegrasi dengan aspek ruang kemiskinan kota mengingat pemahaman tentang pengintegrasian aspek tersebut sangat penting dan

strategis dalam upaya perumusan strategi pengembangan yang secara khusus dapat mengurangi kemiskinan spasial kota padahal perbedaan karakteristik wilayah di Kota Makassar mempengaruhi karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah.

Pada buku yang sederhana ini, penulis telah merespon situasi dan kondisi aktual yang terjadi di tengah masyarakat dalam kurung waktu tertentu dengan mencoba secara terus menerus melakukan pengamatan dan kajian mengenai problem kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini sejak masa pemerintahan Soeharto (1965-1998) sampai pemerintahan Susilo Bambang Yoedhoyono (2005-sekarang) melalui Progam Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006 dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2007 yang memiliki persamaan di mana penanganan masalah kemiskinan dilakukan dengan memberikan bantuan secara langsung dengan kriteria-kriteria tertentu. Dari pengamatan dan kajian penulis banyak melihat fenomena-fenomena yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara

permasalahan dengan ketidak berhasilan, dan tidak sedikit pula fenomena yang mengganjal karena sulitnya para pemangku kepentingan untuk sadar melakukan introspeksi diri terhadap program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pada hal. Gagalnya beberapa program penanggulangan kemiskinan kota di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor antara lain (1). data base yang kurang akurat dan tidak valid. (2). kekeliruan dalam pendekatan, kewenangan dan kelembagaan. (3). lemahnya perumusan pola dan metode penanggulangan kemiskinan.

Berangkat dari hasil refleksi yang penulis lakukan buku yang sederhana ini, mencoba untuk menyajikan bagaimana potret kemiskinan di kota Makassar dengan mencoba menyorot gambaran distribusi masyarakat miskin, faktor penyebab kemiskinan, karakteristik serta pola kemiskinan secara detail. Hal ini dilakukan, berdasarkan pemikiran sederhana penulis bahwa karakteristik dan pola kemiskinan harus mempengaruhi perbedaan penanganan kemiskinan di masing-masing

wilayah.

Penulis sangat berharap, buku ini dapat bermanfaat untuk melengkapi dan Memberikan data ilmiah yang akurat mengenai distribusi kemiskinan kota dalam wilayah Kota Makassar, Memberikan informasi ilmiah dan akurat mengenai karakteristik masyarakat miskin yang dideterminasi dengan faktor kunci penyebab kemiskinan di wilayah kota Makassar, serta Membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan menentukan metode pola penanggulangan masyarakat miskin berdasarkan karakteristik dan pola kemiskinan yang terbentuk.

Penyelesaian buku ini sungguh merupakan suatu perjuangan panjang bagi penulis. Selama proses penulisan berlangsung tidak sedikit kendala yang ditemukan. Namun demikian, solusi untuk mengatasi kendala tersebut ditemukan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu semua, sungguh merupakan nikmat tersendiri bagi penulis setelah buku ini tersusun hingga dapat diterbitkan. Oleh sebab itu pula, sepatutnyalah

penulis berterima kasih kepada Prof. Dr. H. Ramli Umar, M.Si. Prof. Dr. H. Andi Makkulau., Prof. Dr. Hamzah Upu, M.Ed., Drs. M. Nurzakariah Leo, M.Si., Drs. A. Hallaf Hanafie Prasad, M.Si., Dr. Rosmini Maru, S.Pd. M.Si. Sudirman Hasja, S.Pd., M.Pd. dan Syamsir, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan saran, masukan, dan dukungan kepada penulis sehingga buku ini dapat terselesaikan.

Kepada Rektor Unkhair, Dekan FKIP Unkhair, Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Unkhair, serta seluruh dosen dan mahasiswa program studi Pendidikan Geografi Unkhair atas segala perhatian, keramahan, bantuan dan dorongan yang diberikan selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga secara khusus disampaikan kepada Kedua orang tuaku P. Abdul Rasyid dan P. Nurasih, Istriku Tersayang Andi Tenri Pada Agustang, S.Sos., M.Pd. Kedua Mertuaku Prof. Dr. Andi Agustang, MS, dan Andi Syamsiar serta para adikku Astri Rasyid, Andi Dewi, Andi Dody, Andi Suci dan Andi Yosi. yang telah memberikan penulis bantuan moril,

motivasi, insprasi, dan dukungan hingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Juga kepada penerbit Pustaka Ramadhan.yang dengan penuh semangat terus aktif menerbitkan karya-karya dari para cedekiawan Indonesia, termasuk tulisan ini. Maka sudah sepatutnyalah penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENGANTAR	1
BAB II KEMISKINAN (DEFINISI DAN KONSEP)	12
BAB III KEMISKINAN FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA	46
BAB IV PRE RISET TENTANG MASYARAKAT MISKIN KOTA	68
BAB V POTRET SINGKAT KOTA MAKASSAR.....	88
BAB VI EMPAT BELAS INDIKATOR MASYARAKAT KOTA	131

BAB VII DISTRIBUSI MASYARAKAT MISKIN

KOTA MAKASSAR..... 179

BAB VIII FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI

MAKASSAR 220

DAFTAR PUSTAKA 227

PENGANTAR

BAB

I

Pusat perhatian pembangunan tidak hanya terpusat pada modal fisik (kapital dan sumber daya alam) saja, tetapi juga modal manusia (sumber daya manusia). Namun, tidaklah berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diperhatikan dalam proses pembangunan, tetapi upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik perlu mendapat tempat dalam pembangunan.

Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Kualitas hidup yang

lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan lebih tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi itu hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang tidak kalah pentingnya juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar nutrisi (pangan), kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesempatan kerja.

Meski kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai penyempurnaan, namun masih banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan secara sosial ekonomi. Ketimpangan tersebut pada gilirannya menciptakan kelompok-kelompok penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdaya-sumberdaya pembangunan. Kelompok tersebut sering disebut kelompok penduduk atau masyarakat miskin. Saat ini

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah kelompok masyarakat miskin ini semakin banyak dengan semakin besarnya gelombang krisis ekonomi. Terpaan krisis ekonomi tidak hanya meluluhlantahkan program-program pembangunan, namun juga merusak tatanan ekonomi masyarakat yang telah terbangun sebagai hasil dari pembangunan yang selama ini dilakukan. Lebih parah lagi, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyarakat tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasilitas mendasar, seperti fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 1998 jumlah penduduk miskin di Indonesia

berjumlah 36,5 juta jiwa atau 17,86% dari total jumlah penduduk Indonesia, kemudian jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 mengalami peningkatan yakni mencapai 37,34 juta jiwa. Kondisi dan fenomena kemiskinan yang mengungkung sebagian besar masyarakat kita hingga kini masih menyimpan banyak perdebatan. Perdebatan tersebut terutama seputar teori, konsep maupun metode-metode yang menyangkut tentang kondisi kemiskinan di sekitar kita. Perdebatan dimulai dengan penyusunan konsep, indikator, dan langkah-langkah termasuk kebijaksanaan yang harus diambil berhubungan dengan cara mengatasinya, atau dengan bahasa praktisnya penanggulangan kemiskinan. Hal ini menjadi makin menjadi kontras, tatkala pihak-pihak yang mengalami atau berada dalam 'kondisi miskin' terus bertambah jumlah maupun tingkat kemiskinannya.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia, jelas tidak hanya menjadi “milik” pedesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dsb) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan.

Kemiskinan perkotaan (urban poverty) mempunyai permasalahan yang kompleks baik dilihat dari akar permasalahannya maupun dari perspektif kebijakan untuk mengatasinya. Dibandingkan dengan kemiskinan pedesaan yang lebih banyak merupakan kemiskinan struktural, maka tipologi kemiskinan perkotaan mempunyai dimensi sosial ekonomi yang lebih

beragam dan tentunya implikasi kebijakannya akan semakin rumit.

Tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang (*commodization*), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (*enviromental hazards*) dan kehidupan sosial yang individualisitis (*social fragmentation*). Oleh karena itu, Berdasarkan pernyataan tersebut kemiskinan perkotaan mempunyai fenomena yang multi dimensi yang meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, serta ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin perkotaan tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Selain itu juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan keamanan pribadi.

Kemiskinan perkotaan sering dicirikan sebagai deprivasi kumulatif yaitu satu dimensi kemiskinan sering menjadi penyebab atau penyulut dari dimensi kemiskinan lainnya.

Menurut BPS tingkat kemiskinan kota pada tahun 2003 mencapai 12,20 juta jiwa kemudian menurun pada tahun 2004 menjadi 11,40 juta jiwa, dan kembali meningkat menjadi 12,40 juta jiwa pada tahun 2005 (BPS, 2006).

Kota Makassar merupakan salah satu kota provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi di luar Jawa. Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 sekitar 1.130.384 jiwa yang terdiri dari 557.050 jiwa laki-laki dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. Populasi penduduk kota ini adalah 1.112.688 jiwa

ini, mayoritas penduduknya beragama Islam (Pemkot, 2004). Perkembangan Kota Makassar yang relatif cepat beberapa tahun terakhir ini menyebabkan kota ini menjadi daerah tujuan migrasi penduduk dari beberapa kota lainnya di wilayah Indonesia Timur. Hal ini memiliki implikasi terhadap peningkatan masyarakat miskin kota. Penyebab kemiskinan kota pun bervariasi sehingga membentuk kecenderungan penyebaran yang sangat beragam. Kondisi ini berdampak pada sulitnya menemukan solusi pola penanggulangan yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan kota tersebut. Beberapa program pemerintah telah dilaksanakan seperti halnya yang banyak dilakukan di daerah lainnya namun masih dianggap gagal.

Gagalnya beberapa program penanggulangan kemiskinan kota dan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah data base yang kurang akurat dan

tidak valid, kekeliruan dalam pendekatan, kewenangan dan kelembagaan dan lemahnya perumusan pola dan metode penanggulangan. Khususnya di Kota Makassar, pola distribusi yang tidak terpusat, beragamnya faktor penyebab dan pembauran dengan masyarakat menyebabkan sulitnya pendekatan spasial atau wilayah.

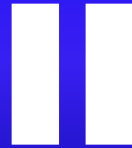
Mengacu pada fakta bahwa kemiskinan merupakan isu strategis nasional yang sesegara mungkin harus dapat diatasi, maka sangat diperlukan sesegara mungkin suatu tindakan tanggap dalam menemukan pola yang lebih tepat. Tindakan ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan kajian komprehensif terhadap masalah kemiskinan kota dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sistematis. Hanya dengan kajian ilmiah yang memungkinkan untuk merumuskan suatu pola baru yang disesuaikan dengan distribusi dan karakteristik masyarakat miskin kota dan yang dapat lebih efektif

dalam menanggulangi kemiskinan kota. Atas dasar inilah sehingga penelitian yang berjudul “Distribusi dan Karakteristik Masyarakat Miskin di Kota Makassar” akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi dan daya guna luaran yang dapat dihasilkan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; (1) gambaran distribusi masyarakat miskin di kota, khususnya di Makassar? (2) Bagaimanakah karakteristik masyarakat miskin yang di wilayah kota, khususnya kota Makassar? (3) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota, khususnya kota Makassar? dan (4) Bagaimanakah gambaran pola kemiskinan di kota, khususnya kota Makassar. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pemahaman terhadap karakteristik masyarakat miskin adalah; (1) Pemetaan distribusi populasi masyarakat miskin di wilayah kota, khususnya kota

Makassar, (2) Penentuan karakteristik masyarakat miskin di wilayah kota, khususnya kota Makassar, (3) Menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kota, khususnya kota Makassar, (4) Menemukan pola kemiskinan di Kota Makassar. Selanjutnya pemahaman distribusi dan karakteristik terhadap masyarakat akan bermanfaat untuk; (1) Memberikan data ilmiah dan akurat mengenai distribusi kemiskinan kota dalam wilayah kota, khususnya kota Makassar. (2) Memberikan informasi ilmiah dan akurat mengenai karakteristik masyarakat miskin yang dideterminasi dengan faktor kunci penyebab kemiskinan di wilayah kota, khususnya kota Makassar, (3) Membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan menentukan metode pola penanggulangan masyarakat miskin.

KEMISKINAN (DEFINISI DAN KONSEP)

BAB



Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu pada bab II ini perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara

merumuskan hubungan antara konsep. Berdasarkan rumusan diatas, peneliti akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

Kemiskinan tidak sebatas hanya dicerminkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pengeluaran. Sajogyo memandang kemiskinan secara lebih kompleks dan mendalam dengan ukuran delapan jalur pemerataan yaitu rendahnya peluang berusaha dan bekerja, tingkat pemenuhan pangan, sandang dan perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kesenjangan desa dan kota, peran serta masyarakat, pemerataan, kesamaan dan kepastian hukum dan pola keterkaitan dari beberapa jalur tersebut.

Kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak

mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Bank Dunia (1990) mendefinisikan kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US\$ 1 per hari.

Selanjutnya Bank Dunia menyebutkan dimensi kemiskinan adalah politik, sosial dan budaya, dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap aset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Biro Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.

Menurut BKKBN bahwa kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian ini didefinisikan lebih lanjut menjadi keluarga miskin, yakni: (1) Paling tidak sekali seminggu keluarga makan daging ikan/telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian baru, (3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni. Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, (2)

Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pada umumnya kemiskinan didefinisikan sebagai pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh masukan kalori dasar. Salah satu pendekatan yang paling baik dan mengimplementasikan matriks keseluruhan dari kemiskinan adalah konsep kebutuhan dasar dari Philipina, yang mendefinisikan dalam tingkat hierarki kebutuhan yaitu: (1) *Survival*: makan/gizi, kesehatan, air bersih/sanitasi, pakaian (2) *Security*: rumah, damai, pendapatan, pekerjaan dan (3) *Enabling*: pendidikan dasar, perawatan keluarga, psikososial.

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan

orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Secara konseptual, Sinaga dan White membagi kemiskinan ke dalam dua aspek (yang menunjuk pada sumber penyebab): kemiskinan alamiah dan buatan (struktural). Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan tingkat teknologi yang dimiliki masyarakat penderita kemiskinan masih sangat langka. Sedangkan kemiskinan struktural lebih diakibatkan oleh perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu sendiri; kemiskinan itu terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat

tidak menguasai sarana-sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka.

Kemiskinan adalah ketidak samaan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial meliputi: (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau aset misalnya tanah, perumahan, peralatan dan lain-lain; tetapi juga mencakup *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; sumber keuangan (pendapatan dan kredit) yang memadai; organisasi sosial politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, usaha kelompok); ketrampilan dan pengetahuan yang memadai

dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan manusia.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (income) komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max-Neef et. al, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas dan membentuk suatu pola kemiskinan

tertentu, yaitu :

- (1) Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
- (2) Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.
- (3) Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
- (4) Kemiskinan partisipasi , tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.

- (5) Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
- (6) Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Terdapat beberapa pola kemiskinan, (a) dari pola waktunya yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun (*persistent poverty*); (b) *cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (c) *seasonal poverty* yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering terjadi pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan; dan (d) *accidental poverty* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) juga membagi kemiskinan ke dalam 3 kategori yaitu:

(1) Sangat miskin

Kemampuan minimal untuk memenuhi konsumsi setara atau kurang dari 1900 kalori per orang perhari dan pengeluaran Non Makanan atau senilai Rp120.000 per orang per bulan.

(2) Miskin

Kemampuan minimal untuk memenuhi konsumsi antara 1900-2100 kalori perorang dan pengeluaran non makanan atau senilai Rp 150.000 perorang per bulan.

(3) Mendekati Miskin

Kemampuan minimal untuk memenuhi konsumsi antara 2100-2300 kalori perorang

perhari dan pengeluaran Non makanan atau senilai Rp 175.000 perorang per bulan.

BKKBN mengklasifikasikan 5 kategori keluarga 2 diantaranya adalah keluarga miskin. Identifikasi keluarga miskin berdasarkan indikator ekonomi (pangan, sandang, papan, pekerjaan, pendidikan, transportasi dan tabungan). dan bukan ekonomi (Agama, kesehatan, keluarga berencana, interaksi diantara anggota rumahtangga, informasi dan peran sosial). Adapun pembagiannya yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III) dan Keluarga Sejahtera III plus (KS III+). Keluarga miskin umumnya yang tergolong dalam Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) dimana jika keluarga Pra Sejahtera dan KS I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah

satu atau lebih indikator yang telah ditentukan. Adapun 2 pembagian kemiskinan menurut BKKBN yaitu:

(1) Miskin

Keluarga miskin yakni keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (1) Paling tidak sekali seminggu keluarga makan daging ikan/telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian baru, (3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

(2) Sangat Miskin

Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga

makan 2 kali sehari atau lebih, (2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Kemiskinan dapat dibedakan ke dalam tiga pengertian, yaitu :

(1) Kemiskinan Absolut

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan itu terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan

prasarana fisik dan kelangkaan modal serta lainnya.

(2) Kemiskinan Relatif

Adalah pendapatan seseorang yang sudah diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan

(3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berurusan untuk

memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya

Berdasarkan kriteria dari Bank Dunia (*The World Bank*), maka kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- (1) Miskin Absolut yaitu jika pendapatan kurang dari 1 \$ (dollar) per hari
- (2) Miskin Relatif yaitu jika pendapatan lebih dari 1 \$ (dollar) per hari

Pendapatan keluarga adalah jumlah semua hasil perolehan yang didapat oleh anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. Pendapatan keluarga meliputi penghasilan ditambah dengan hasil-hasil lain. Pendapatan keluarga mempunyai peran yang penting terutama dalam memberikan efek terhadap taraf hidup mereka. Efek di sini lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan, dimana perbaikan

pendapatan akan meningkatkan tingkat gizi masyarakat. Pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan dan fasilitas lain (pendidikan, perumahan, kesehatan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi status gizi.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam. Mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Definisi kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Indikator kemiskinan menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan kemiskinan dapat dilihat terhadap kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2 - 100 kalori per

kapita. Sementara standar kebutuhan dasar untuk keluarga miskin di masing-masing negara berbeda-beda. PBB menetapkan bahwa batas kemiskinan dihitung dari pendapatan hariannya yaitu \$ 2/orang/hari, sementara BPS menentukan batas kemiskinan dari jumlah rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yaitu 2-100 kalori/orang/hari.

Ciri-ciri yang menandai rumah tangga miskin umumnya terjalin erat satu dengan yang lain dalam suatu mata rantai. Mata rantai ini kadang disebut sindrom kemiskinan atau perangkap kemiskinan. Kekuatan masing-masing mata rantai berbeda-beda, namun dapat dilukiskan satu persatu. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 62% angkatan kerja rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian di pedesaan, disusul pada kegiatan di sektor perdagangan

sebagai pedagang kecil 10%, industri rumah tangga 7%, dan jasa 6%. Umumnya sebagian besar anggota rumah tangga miskin bekerja pada kegiatan-kegiatan yang memiliki produktivitas tenaga kerja rendah. Hal ini erat kaitannya dengan rendahnya aksesibilitas angkatan kerja terhadap penguasaan faktor produksi. Kenyataannya angkatan kerja tersebut cenderung lebih mengandalkan pekerjaan fisik dengan keterampilan yang minimal dibandingkan dengan faktor produksi lain berupa aset produktif dan permodalan.

Komite Penanggulangan Kemiskinan menetapkan bahwa garis kemiskinan adalah US \$ 50 perkapita pertahun untuk pedesaan dan US \$ 75 perkapita per tahun untuk perkotaan. Sementara standar kebutuhan kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu : 1) golongan paling miskin pendapatannya 240 kg atau

kurang beras perkapita pertahun; 2) golongan miskin sekali pendapatannya 240 hingga 360 kg beras perkapita per tahun; dan 3) golongan miskin pendapatannya lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg beras perkapita pertahun.

Garis kemiskinan dapat dihitung secara teoritis dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Garis kemiskinan yang ditentukan berdasarkan tingkat produksi, misalnya produksi padi perkapita, hanya dapat menggambarkan kegiatan produksi tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup. Perhitungan garis kemiskinan dengan pendekatan pendapatan rumah tangga dinilai paling baik. Cara ini tidak mudah dilakukan karena kesulitan untuk memperoleh data pendapatan rumah tangga yang akurat. Mengatasi kesulitan tersebut, maka garis

kemiskinan ditentukan dengan pendekatan pengeluaran yang digunakan sebagai proksi atau perkiraan pendapatan rumah tangga.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam studi-studi empiris adalah sebagai berikut; 1) *Incidence of poverty*, yang menggambarkan persentase dari populasi yang hidup dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan; 2) *Depth of poverty*, yang menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan *poverty gap index*; 3) *Severity of poverty*, yang menunjukkan kepelikan kemiskinan di suatu wilayah, yang merupakan rata-rata dari kuadrat kesenjangan kemiskinan (Yudhoyono dan Harniati, 2004; Nanga, 2006; dan Foster *et al.*, 1984). Sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yaitu *axiomatic approach* dan *stochastic*

dominance. Pendekatan yang sering digunakan dalam studi-studi empiris adalah pendekatan pertama dengan tiga alat ukur yaitu: (1) *the generalized entropy* (GE), (2) *the Atkinson measure*, dan (3) *Gini coefficient*. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah pendekatan *equality distributed equivalent* (EDE), yaitu standar hidup dari masyarakat dimana pendapatan menjadi acuan batas garis kemiskinan dan pendekatan kombinasi antara pendapatan dan garis kemiskinan menjadi *poverty gaps* dan mengelompokkannya dalam kesejahteraan masyarakat.

Indikator atau kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk 2010 dan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT), maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

- (1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- (2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan.
- (3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
- (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- (6) Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai kanal atau air hujan.
- (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang atau minyak tanah.

- (8) Hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu.
- (9) Hanya belanja/membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- (10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
- (13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD.

- (14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak , motor, atau barang modal lainnya.

Selain itu, BAPPENAS merumuskan indikator-indikator kemiskinan sebagai berikut:

- (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004);

(2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial

hanya menjangkau 18,74 persen penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;

(3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung;

(4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migrant perempuan dan pembantu rumah tangga;

- (5) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai;
- (6) terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air;
- (7) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta

ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian;

(8) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;

(9) lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi

3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;

- (10) lemahnya partisipasi. Berbagai kasus pengusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme

perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;

- (11) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.

Sementara itu, indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas,

- (2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
- (3) Pembangunan yang bias kota,
- (4) Perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat,
- (5) Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi,
- (6) Rendahnya produktivitas,
- (7) Budaya hidup yang jelek,
- (8) Tata pemerintahan yang buruk, dan
- (9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Berdasarkan pendapat di atas maka indikator utama tingkat kemiskinan dapat dirumuskan seperti yang terlihat pada table berikut.

Indikator	Keterangan
Ekonomi rendah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; ▪ Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; ▪ Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
Terbatasnya sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; ▪ Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; ▪ Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; ▪ Terbatasnya akses terhadap air bersih; ▪ Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
Terbatasnya perlindungan social dan politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; ▪ Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; ▪ Lemahnya jaminan rasa aman; ▪ Lemahnya partisipasi; ▪ Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya

korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

KEMISKINAN, FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA

BAB



Kemiskinan perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering dituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu lain, perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan.

Dipandang dari sudut ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya : 1) secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang, 2) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, 3) kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal, 4) di daerah perkotaan, derasnya arus migran masuk juga memberi dampak terhadap semakin banyaknya penduduk dalam katagori miskin.

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Banyak faktor yang berperan menjadi penyebab kemiskinan. Ketidakberuntungan (*disadvantages*) yang melekat pada keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan aset (*poor*), kelemahan kondisi fisik (*physically weak*), keterisolasian (*isolation*), kerentanan (*vulnerable*), dan ketidakberdayaan

(*powerless*) adalah berbagai penyebab mengapa keluarga miskin selalu kekurangan dalam memenuhi dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan layak untuk anak-anaknya. Kondisi serba kekurangan dari masyarakat miskin tersebut menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kondisi kemiskinan juga menjadi diperparah karena kewajiban sosial yang ditanggung keluarga miskin, seperti kewajiban menyumbang.

Rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak tergolong miskin. Diasumsikan bahwa jumlah anggota rumah tangga merupakan beban tanggungan pengeluaran, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga miskin memiliki beban yang lebih berat dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarganya dibandingkan dengan rumah tangga yang

tidak tergolong miskin.

Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik, terampil dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja harus selalu lentur dan berwawasan lingkungan agar pendidikan keterampilan dan keahlian dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan jenis-jenis keterampilan serta keahlian profesi yang selalu berubah.

Kemiskinan dan disharmoni keluarga adalah faktor dominan penyebab anak perginya ke jalan. Kedua faktor tersebut, adakalanya berkaitan satu dengan yang lain, yakni, faktor disharmoni muncul sebagai akibat dari faktor kemiskinan keluarga atau sebaliknya. Umumnya

anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Orang tua mereka bekerja sebagai pekerja kasar, seperti buruh pabrik, buruh pelabuhan, dan montir, dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp 400.000,00 per bulan dan beban tanggungan antara empat sampai enam orang.

Penyebab kemiskinan dibedakan atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

(1) Faktor internal

Faktor internal adalah aktor (individu) itu sendirilah yang menyebabkan kemiskinan bagi dirinya sendiri. Menurut Alkostar (dalam Mahasin,1991), faktor internal yang menyebabkan kemiskinan adalah: sifat malas (tidak mau bekerja), lemah mental, cacat fisik dan cacat psikis (kejiwaan). Menurut Friedman (1979), secara internal masyarakat miskin adalah

karena malas mengakumulasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

(2) Faktor eksternal

Kemiskinan yang disebabkan faktor eksternal (eksogen) adalah terjadinya kemiskinan disebabkan oleh-oleh faktor-faktor yang berada di luar diri dari orang tersebut. Faktor eksternal terdiri dari: Faktor Alamiah dan Faktor Buatan (struktural).

a) Faktor alamiah

Ada beberapa faktor alamiah yang menyebabkan kemiskinan, antara lain: keadaan alam yang miskin, bencana alam, keadaan iklim yang kurang menguntungkan. Kemiskinan alamiah dapat juga ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan kerja anggota keluarga karena usia bertambah dan sakit keras untuk waktu yang cukup lama.

b) Faktor buatan (struktural)

Faktor buatan yaitu terjadinya masyarakat miskin karena tidak mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara cepat (dalam arti yang menguntungkan) terhadap perubahan-perubahan teknologi maupun ekonomi, mengakibatkan kesempatan kerja yang dimiliki mereka semakin tertutup. Mereka tidak mendapatkan hasil yang proporsional dari keuntungan-keuntungan akibat dari perubahan-perubahan itu.

Kemiskinan buatan (struktural) itu adalah buatan manusia, dari manusia dan terhadap manusia pula. Kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), dapat mencakup baik struktur ekonomi, politik, social dan kultur. Struktur-struktur ini terdapat pada lingkup nasional maupun internasional.

Menurut Alkostar (Mahasin, 1991), faktor eksternal penyebab terjadinya gelandangan (kaum miskin) adalah:

- 1) Faktor ekonomi: kurangnya lapangan kerja; rendahnya pendapatan per kapita dan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
- 2) Faktor Geografi: daerah asal yang minus dan tandus sehingga tidak memungkinkan pengolahan tanahnya.
- 3) Faktor Sosial: arus urbanisasi yang semakin meningkat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosialnya.
- 4) Faktor Pendidikan: relatif rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal.
- 5) Faktor Kultural: pasrah kepada nasib dan adat istiadat yang merupakan rintangan dan hambatan mental.

- 6) Faktor lingkungan keluarga dan sosialisasi.
- 7) Faktor kurangnya dasar-dasar ajaran agama sehingga menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak mau berusaha.

Dasar hukum utama penanggulangan kemiskinan adalah UUD 1945. Menurut pasal 34 UUD 1945 (amandemen keempat yang disahkan tanggal 10 Agustus 1945, dalam Syaefudin, 2003) yang terdiri dari 4 ayat dicantumkan secara jelas landasan program kemiskinan, sebagaim berikut:

- (1) Ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
- (2) Ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

(3) Ayat 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

(4) Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Kemudian dalam pasal 28 H UUD 1945 (perubahan kedua yang disyahkan pada tanggal 10 Agustus 1945, dalam Syaefudin, 2003) berbunyi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pada tingkat yang lebih implementatif, dalam UU No. 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, disebutkan empat strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- (1) Penciptaan kesempatan (*create opportunity*) melalui pemulihan ekonomi makro, pembangunan yang baik, dan peningkatan pelayanan umum
- (2) Pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) dengan meningkatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan politik.
- (3) Peningkatan kemampuan (*increasing capacity*) melalui pendidikan dan perumahan.
- (4) Perlindungan social (*social protection*) untuk mereka yang memiliki cacat fisik, fakir miskin, kelompok masyarakat yang terisolir, serta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan korban konflik social.

Poin nomor 4 menunjukkan perlunya kebijaksanaan segmentatif terhadap golongan paling bawah/miskin, karena mereka belum mampu mengakses

point 1, 2 dan 3 secara langsung. Pembentukan KPK (Komisi Penanggulangan Kemiskinan didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 jo. Nomor 8 tahun 2002, menargetkan penurunan kemiskinan dari 19 persen di tahun 2004.

Pada tataran yang lebih jelas, pemerintah terus menerus mengembangkan Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) suatu program yang bertujuan memberikan perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jaminan sosial oleh negara terhadap seluruh penduduknya merupakan hak asasi manusia. Kelompok masyarakat paling tak beruntung ini merupakan salah satu komponen yang dicakup di dalamnya.

Secara universal dijamin dalam Pasal 22 dan 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1958. Di

Indonesia, hal ini termaktub dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dimana "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dan lebih jauh adalah UU No. 6 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial.

Dua isu sentral masalah pembangunan yang masih menghantui Bangsa Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Banyak kasus kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan. Di lain sisi, kemiskinan menghambat akses terhadap pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu sumberdaya manusia. Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang relatif

banyak ini terutama dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengentasannya, baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya tersebut belum secara signifikan dapat mengentaskan kemiskinan dengan terlihat masih banyaknya jumlah penduduk miskin.

Komite Penanggulangan Kemiskinan dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak

lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Sasaran upaya penanggulangan kemiskinan ini adalah penduduk miskin. Berdasarkan data yang ada, populasi penduduk miskin di Indonesia sebelum krisis tahun 1996 sekitar 11,34%, setelah krisis tahun 1998 sekitar 24,23%, dan diakhir tahun 2000 sekitar 18,95%

Upaya pemberdayaan keluarga miskin dalam bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, serta ketrampilan keluarga dalam bidang ekonomi produktif. Imam (2003) mengungkapkan beberapa strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas keluarga melalui pemberdayaan dibidang usaha dan keterampilan

dengan pokokpokok kegiatan sebagai berikut: 1) penumbuhan dan pengembangan kelompok; 2) pembinaan dan pengembangan usaha; dan 3) pengembangan keterampilan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan. Mulai dari program yang ditujukan untuk petani melalui berbagai skim kredit dan subsidi sampai pada berbagai program pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti pemberian dana bergulir, program ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Program-program tersebut belum secara signifikan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa banyak program penanggulangan kemiskinan tidak efektif atau bagaimana bentuk program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

Kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan, diawali dari beberapa persoalan seperti; 1) program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dana bantuan; 2) kecilnya peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola perguliran; 3) adanya gejala ketidaktepatan pendataan penduduk miskin; 4) kecenderungan adanya pemilihan daerah sasaran program dengan harapan tingkat keberhasilannya dapat lebih diukur; 5) sikap mental penduduk miskin yang cenderung pasrah.

Pengentasan kemiskinan di lakukan pemerintah Indonesia melalui beberapa program yang tertuang dalam proyek/program antara lain: Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres SD, Inpres Kesehatan, Bantuan Desa (Bandes). Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan setelah krisis meneter melanda Indonesia, Kompensasi BBM sebagai pengalihan subsidi

BBM, beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan beberapa proyek/program lainnya. Kiat inilah angka kemiskinan berkurang terutama di daerah pedesaan.

Zulkifli (1993) menawarkan jalan keluar dari kemiskinan pada beberapa tingkatan masyarakat melalui pendekatan kebijaksanaan mikro sebagai berikut: 1). kebijaksanaan untuk petani; 2) kebijaksanaan untuk pedagang kakilima dan asongan; 3) kebijaksanaan untuk pengrajin kecil di pedesaan; 4) kebijaksanaan untuk nelayan; 5) kebijaksanaan untuk pengangguran; 6) kebijaksanaan untuk gelandangan.

Kemiskinan mengandung banyak pengertian, berubah dari satu tempat ke tempat yang lain pada setiap waktu, dan telah dideskripsikan dalam berbagai perspektif. Umumnya manusia tidak ingin terperangkap ke dalam kondisi kemiskinan. Kemiskinan muncul diakibatkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor Internal dan

faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari : keterbatasan karakter, pendidikan/pengetahuan, harta benda /ekonomi, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, keadilan, penghargaan, kekuasaan, keamanan dan kebebasan sedangkan faktor eksternal terdiri dari dua yaitu : faktor alamiah dan faktor buatan (struktural). faktor alami adalah yang menyebabkan kemiskinan, antara lain: keadaan alam yang miskin, bencana alam, keadaan iklim yang kurang menguntungkan dan faktor buatan adalah masyarakat miskin karena tidak mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan-perubahan teknologi maupun ekonomi, mengakibatkan kesempatan kerja yang dimiliki mereka semakin tertutup.

Karakteristik rumah tangga sangat mempengaruhi sehingga suatu masyarakat dikategorikan ke dalam garis kemiskinan, berdasarkan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk 2010 dan

Departemen Komunikasi dan Informatika dalam Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) ada 14 indikator yang menjadi penentu dari kemiskinan. Dengan menerapkan ke 14 indikator tersebut ke setiap sampel rumah atau KK yang terwakili dari populasi maka akan didapatkan sebaran kemiskinan secara keseluruhan di tingkat kecamatan di Kota Makassar. Dengan demikian, apabila karakteristik dan faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat dideterminasi dengan cermat akan didapatkan faktor kunci penyebab masing-masing karakteristik, sehingga akan lebih mudah merumuskan sulusnya sebab apabila rumusan pola penanggulangan kemiskinan tersebut dibuat atas pertimbangan kesesuaian antara pokok permasalahan masing-masing karakteristik masyarakat miskin maka jelas peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih juga lebih besar. Apalagi jika rumusan pola penanggulangan kemiskinan tersebut

terlebih dahulu diuji dengan melihat tingkat ekspektasi secara langsung oleh masyarakat miskin, maka tentu lebih meyakinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan atas konsep dan pemikiran tersebut di atas maka dengan melakukan penelitian yang mengambil data yang berhubungan dengan kemiskinan dan faktor penyebabnya lalu dianalisis dengan tepat maka akan dihasilkan suatu rumusan pola penanggulangan yang tepat. Apabila hasil rumusan ini disajikan dalam bentuk peta tematik yang memudahkan para pengguna (utamanya pemerintah setempat) untuk menginterpretasi maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan rekomendasi pola penanggulangan kemiskinan yang akan lebih mudah dilaksanakan dengan peluang memberikan hasil yang lebih efektif sangat besar.

PRE RISET TENTANG MASYARAKAT MISKON KOTA

BAB

IV

Setiap penelitian yang dilakukan diperlukan metode dalam mengumpulkan dan mengolah hasil penelitian. Oleh karena itu dalam Bab III diuraikan mengenai beberapa hal yang terkait erat dengan rencana penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian mengenai keadaan status manusia, suatu obyek, suatu

set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu klas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab akibat melalui identifikasi dari gejala yang ada dari permasalahan. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian deskriptif maka dapat dilakukan berbagai identifikasi serta analisis kondisi kemiskinan kota sehingga akan menghasilkan output berupa peta tematik distribusi dan karakteristik kemiskinan kota yang dapat dijadikan referensi dalam menanggulangi kemiskinan kota. Pola kesesuaian antara tipe kemiskinan kota dengan metode

penanggulangannya dapat dijadikan acuan dalam menentukan prioritas dan langkah strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan kota bagi pihak yang berwenang.

Lokasi pengambilan sampel meliputi 14 (empat belas) kecamatan dalam wilayah administratif Kotamadya Makassar antara lain : Kecamatan Manggala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Biringkanayya, Kecamatan Ujungpandang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Makassar.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga miskin berdasarkan data terakhir di seluruh wilayah kota Makassar yang diperoleh berdasarkan pencatatan yang ada pada instansi yang menangani masalah kemiskinan.

Pada dasarnya semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel dalam sebuah penelitian. Populasi sampel yang akan diteliti adalah masyarakat miskin yang tinggal di daerah permukiman Kota Makassar. Menurut data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Makassar tahun 2010, jumlah penduduk miskin yang tinggal di lingkungan Kota Makassar adalah 68.477 kepala keluarga yang tersebar di empat belas kecamatan di Kota Makassar.

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *proporsional area random*

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah dimana masing – masing bagian terambil sampelnya secara acak. Penentuan sampel dihitung dengan rumus Slovin (1960) *dalam* Seivilla (1993) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} = \frac{68.477}{1 + 68.477 (0,01)} = \frac{68.477}{685,77} =$$

$$99,85 = 100$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir/diinginkan, misalnya untuk penelitian ini digunakan (10%)

Berdasarkan survey Kit, untuk menentukan jumlah sampel yang cukup representatif dalam penelitian, maka jumlah sampel yang digunakan sekarang-

kurangnya sebanyak 30 sampel, karena nilai-nilai atau skor yang diperoleh dari sampel yang berjumlah lebih dari 30, distribusinya akan mengikuti distribusi normal.

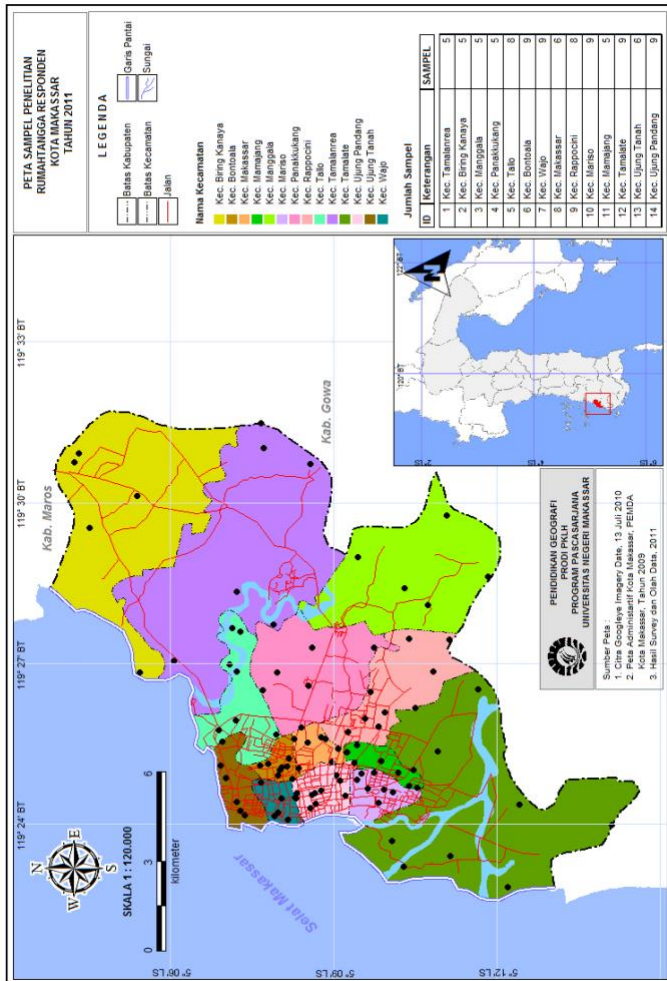
Dengan demikian, maka pada lokasi studi permukiman miskin kota di kota Makassar, dari 68.477 keluarga miskin diambil sampel secara *random* sebanyak 89 responden (KK). Responden tersebut tersebar di kota Makassar dan akan dibagi secara merata ke keluarga miskin di setiap kecamatan. Adapun populasi dan sampel yang telah ditentukan untuk setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Populasi Miskin (KK)	Persentase (%)	Jumlah Sampel (KK)
1	Mariso	5.920	8,65	9
2	Mamajang	1.896	2,77	5

3	Tamalate	10.184	14,87	9
4	Rappocini	5.503	8,04	8
5	Makassar	4.608	6,73	6
6	Ujung Pandang	7.012	10,24	9
7	Wajo	9.167	13,39	9
8	Bontoala	6.888	10,06	9
9	Ujung Tanah	2.587	3,78	6
10	Tallo	5.260	7,68	8
11	Panakukang	971	1,42	5
12	Manggala	707	1,03	5
13	Biringkanyya	4.081	5,96	6
14	Tamalanrea	3.693	5,39	6
Jumlah		68.477	100	100

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dan Analisis Data, 2011

Secara keruangan jumlah populasi dan sampel yang telah ditentukan untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar. 4.1 Peta Jumlah Kebutuhan Sampel
Kemiskinan di Kota Makassar

Variabel penelitian merupakan gejala yang bervariasi yang diamati dalam suatu penelitian, atau dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah objek penelitian. Variabel yaitu konsep yang diberi nilai lebih dari satu nilai dan salah satu ciri pokoknya adalah berbentuk dikrit (*diskrite*) atau variabel bersambung (*continuous*).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian. Bertolak dari tujuan penelitian dan Indikator atau Kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk 2010 dan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT), maka variabel

yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- (1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- (2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan.
- (3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
- (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- (6) Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai kanal atau air hujan.
- (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang atau minyak tanah.

- (8) Hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu.
- (9) Hanya belanja/membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- (10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
- (13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD.
- (14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti :

sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak , motor, atau barang modal lainnya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Kuesioner

Yaitu suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Metode ini digunakan untuk mengetahui profil Keluarga miskin di Kota Makassar

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara merupakan bagian dari teknik

komunikasi dimana pencari data mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk menggali data yang diperlukan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab kemiskinan di Kota Makassar.

3) Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dengan mengumpulkan data-data dari catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, artikel, agenda, dan sebagainya ataupun dari kantor dan instansi-instansi terkait. Kepustakaan ini digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan penduduk miskin

4) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran sebenarnya dari kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan yang dapat dilihat melalui gambar-gambar yang di ambil dari hasil pemotretan lokasi.

5) Kartografi

Pengumpulan data untuk mengambil sampel acak dengan menggunakan peta sebaran permukiman di Kota Makassar (hasil interpretasi citra), setiap kondisi kemiskinan tiap sampel rumah kemudian akan di *upload* dalam peta untuk menentukan distribusi atau agihan kemiskinan di Kota Makassar.

Penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi empat tahap utama, yaitu:

1) Tahap persiapan yang meliputi:

- a) Menyiapkan perijinan untuk penelitian pada instansi setempat dan peralatan yang digunakan dalam survei lapangan.
 - b) Menyiapkan kuesioner untuk pengumpulan data primer.
 - c) Menyiapkan alat analisis
- 2) Tahap kajian atau penelitian kepustakaan atau penelusuran literatur kajian atau penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan:
- a. Metode penelitian.
 - b. Pengertian istilah (*terminology*) atau kata kunci yang akan digunakan.
 - c. Teori dan konsep yang berkaitan dengan kemiskinan di perkotaan dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

- d. Teori-teori tentang kemiskinan yang tercermin pada permukiman kumuh dan liar, sektor informal masyarakat miskin dan rentan pangan.
 - e. Teori yang berkaitan dengan sebab akibat terjadinya kemiskinan di perkotaan.
 - f. Tindakan dan kebijaksanaan dalam mengatasi kemiskinan kota dan rentan pangan.
- 3) Penelitian lapangan, yang merupakan kegiatan antara lain meliputi:
- a. Observasi/pengamatan lapangan yang dilakukan untuk mengetahui fenomena-fenomena kemiskinan di perkotaan dan rentan pangan khususnya yang terjadi di lokasi penelitian.

- b. Pengambilan data primer melalui wawancara dengan responden menggunakan kuesioner.
 - c. Pengamatan aktivitas dan lokasi penelitian melalui sketsa suasana maupun pengambilan foto sebagai data fisik.
- 4) Kegiatan inventarisasi dan analisis data yang meliputi kegiatan:
- a. Melakukan pengolahan dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil survei, berupa kompilasi data yang berkaitan dengan karakteristik kemiskinan perkotaan dan rentan pangan di kota Makassar.
 - b. Melakukan analisis data sesuai dengan pendekatan dan metodologi penelitian karakteristik kemiskinan perkotaan dan

rentan pangan pada permukiman miskin kota Makassar.

5) Penyusunan laporan penelitian.

Dalam tahap analisis data akan dilakukan kegiatan seperti data entri, pengkodean, tabulasi, editing, analisis dan pemetaan. Dalam analisis data digunakan beberapa perangkat lunak/software untuk pembuatan data base, dan analisis data akan dijalankan menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel. Sementara, Distribusi spasial menurut wilayah akan digambarkan dalam bentuk peta tematik menggunakan bantuan perangkat lunak ArcView 3.2 dan MapInfo 8.

Analisis yang digunakan untuk menggolongkan sebuah keluarga sebagai miskin dalam penelitian ini adalah deskriptif persentase dimana apabila salah satu saja dari 14 indikator/kriteria yang digunakan oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk 2010 dan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) sudah terpenuhi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta– fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu (Suharto, 1993 : 35). Analisis deskriptif dapat dilengkapi dengan penggambaran secara persentase atau tabel. Adapun rumus perhitungan persentase yang digunakan sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \cdot 100\%$$

dimana % = persentase yang diperoleh

n = jumlah skor yang diperoleh dari data

N = jumlah skor ideal (Muhammad Ali, 1992 : 184)

POTRET SINGKAT KOTA MAKASSAR

BAB

V

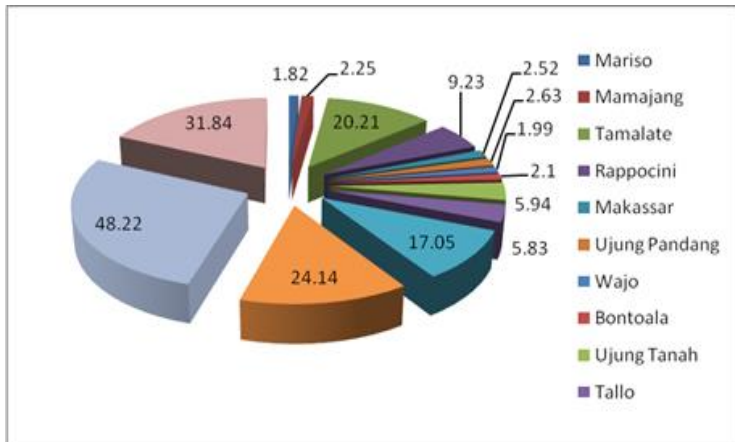
Kota Makassar merupakan salah satu kota/kabupaten dari 3 kota dan 20 Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan, terbagi dari 14 kecamatan dengan luas keseluruhan hanya sekitar 175,77 km².

Secara geografis Kota Makassar berada pada lintang 5°8'6.19" LS dan 119°24'17.38" BT, sedangkan secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Maros di bagian utara dan bagian timur, Kabupaten gowa di bagian selatan serta selat Makassar di bagian barat.

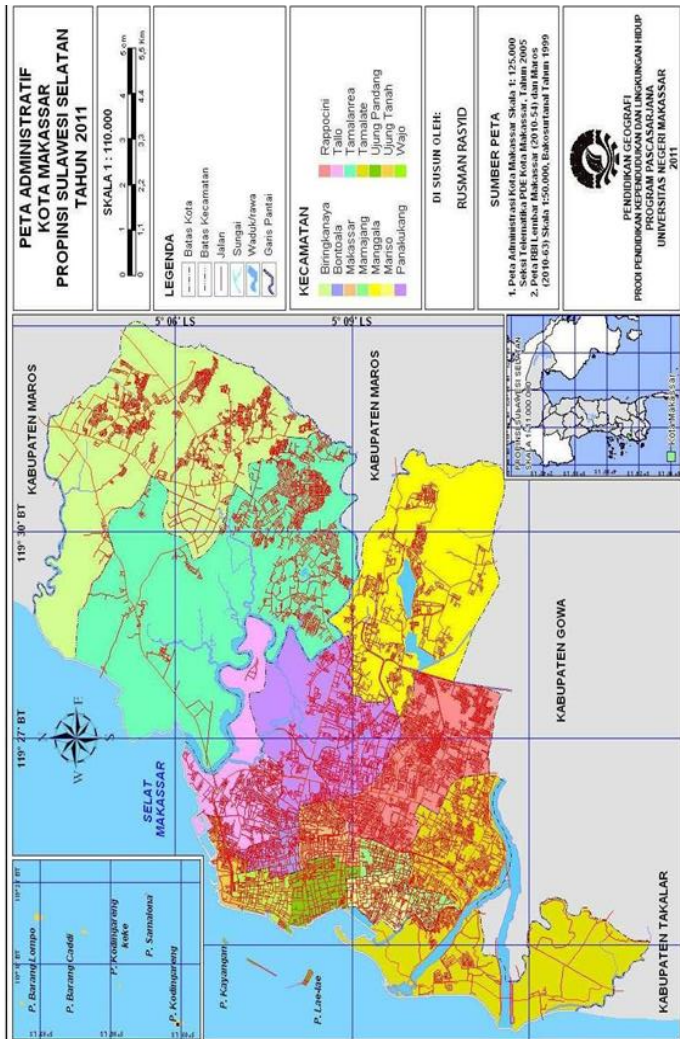
untuk lebih jelas pembagian wilayah administratif Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.1 dan diagram serta secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut :

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakukang	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanayya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,11
Jumlah		175,77	100

Sumber : Makassar dalam angka 2010



Gambar 5.1 Diagram Pembagian Wilayah Administratif Kota Makassar



Gambar. 5.2 Peta Administratif Kota Makassar

Gambar. 4.2 Peta Administratif Kota Makassar

Penggunaan Lahan

Kawasan subur adalah kawasan kota yang secara fungsional dan fisik berada dalam transisi dan didominasi oleh kegiatan non agraris . Hal ini berarti bahwa masih terdapat lahan agraris walaupun tidak lagi dominan. Begitupula dengan kawasan Kota Makassar yang secara fungsional kegiatan penduduknya didominasi kegiatan non agraris. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2009 penggunaan lahan Kota Makassar dapat di klasifikasikan menjadi 7, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota Makassar

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pekarangan/lahan untuk bangunan dan lahan sekitar	11.932	67,88
2	Sawah irigasi	2.031	11,55

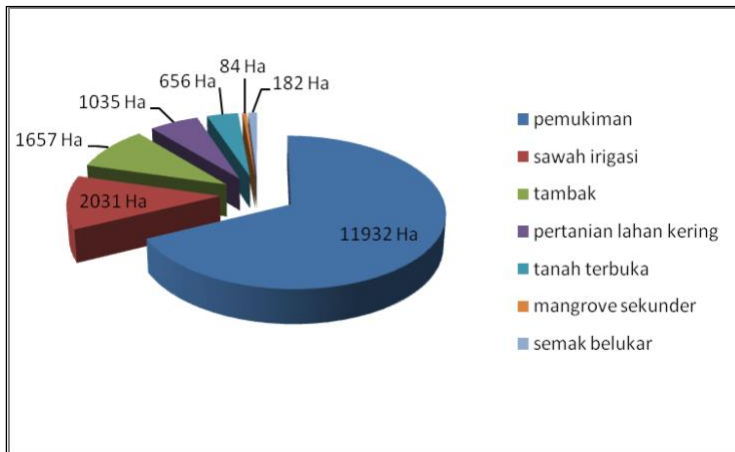
3	Tambak	1.657	9,43
4	Pertanian Lahan Kering	1.035	5,89
5	Tanah Terbuka	656	3,73
6	Mangrove Sekunder	84	0,48
7	Semak Belukar	182	1,04
Jumlah		17.577	100

Sumber : Makassar dalam angka 2010

Dari tabel di atas persentase penggunaan lahan yang paling dominan yaitu permukiman dengan luas hampir separuh dari luas kota Makassar yaitu sekitar 67,88 % atau dengan luas 11.932 Ha, kemudian sawah irigasi dengan luas 2.031 ha atau 11,55 %, tambak dengan luas 1.657 ha atau sekitar 9,43%, pertanian lahan kering dengan luas 1.035 ha atau sekitar 5,89% dan tanah terbuka dengan luas mencapai 656 atau sekitar 3,73 % .

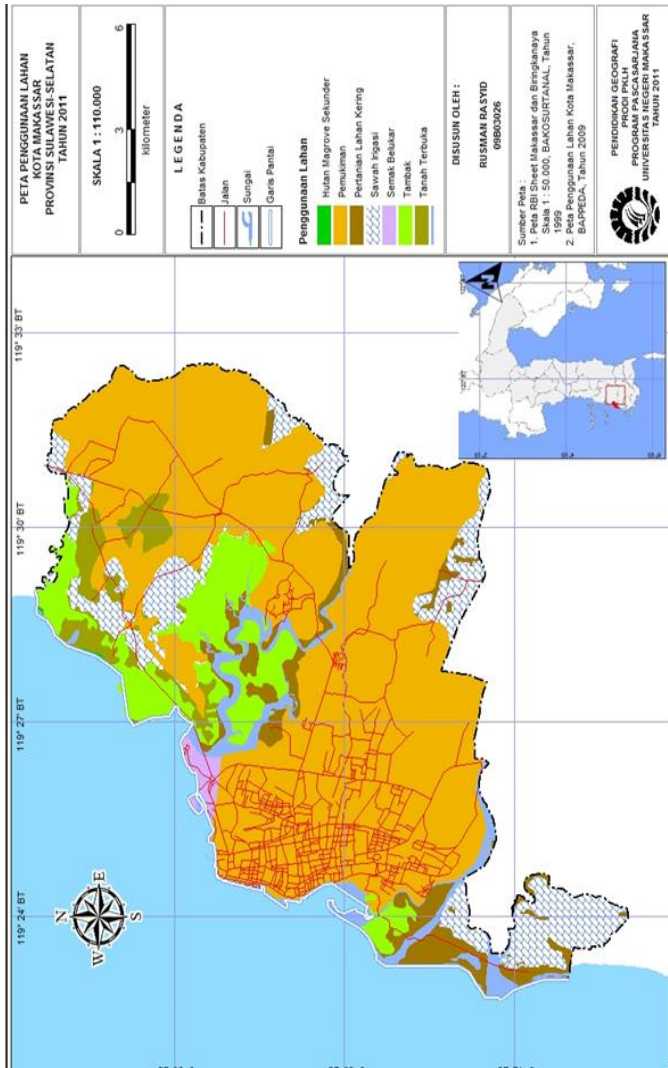
Penggunaan lahan paling sempit semak belukar yang hanya sekitar 182 ha atau 1,04%, dan mangrove

sekunder dengan luas hanya sekitar 84 ha atau 0,48%. Perbandingan luasan penggunaan lahan di kota Makassar dapat diperhatikan dalam gambar 4.3 berikut.



Gambar 5.3 Diagram Perbandingan Penggunaan Lahan Kota Makassar

Secara keruangan kondisi penggunaan lahan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:



Gambar. 5.4 Peta Penggunaan Lahan Kota Makassar

Gambar. 4.4 Peta Penggunaan Lahan Kota Makassar

Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa.

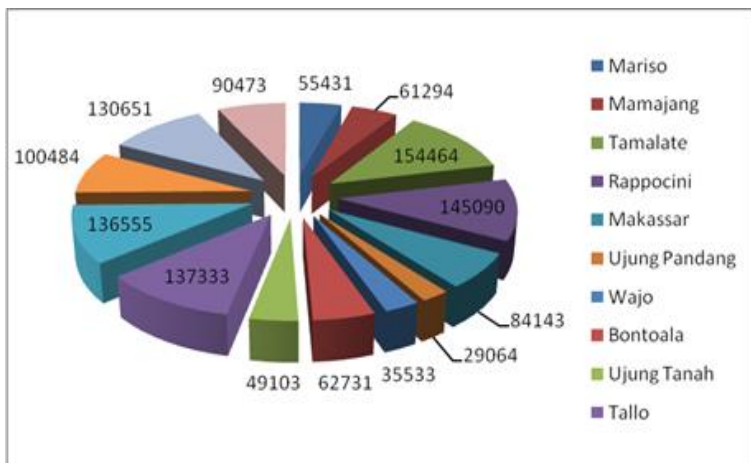
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

Untuk lebih jelasnya kondisi penduduk kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Penduduk	
				Jumlah	Persentase
1	Mariso	26.719	28.712	55.431	4,36
2	Mamajang	29.705	31.589	61.294	4,82
3	Tamalate	74.745	79.719	154.464	12,14
4	Rappocini	69.137	75.953	145.090	11,40
5	Makassar	39.832	44.311	84.143	6,61
6	Ujung Pandang	13.795	15.269	29.064	2,28
7	Wajo	17.147	18.386	35.533	2,79
8	Bontoala	29.460	33.271	62.731	4,93
9	Ujung	24.185	24.918	49.103	3,86
10	Tallo	67.101	70.232	137.333	10,79
11	Panakukang	64.365	72.190	136.555	10,73

12	Manggala	48.219	52.265	100.484	7,90
13	Biringkanyaya	62.660	67.991	130.651	10,27
14	Tamalanrea	43.200	47.273	90.473	7,11
Jumlah		610.270	662.079	127.2349	100

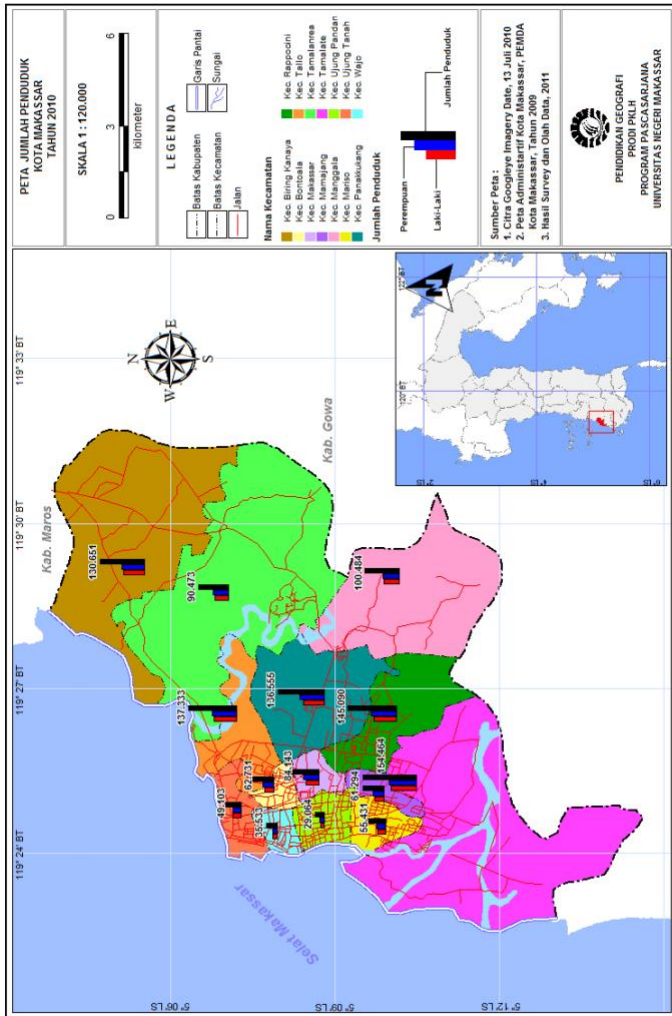
Sumber : Makassar dalam angka, 2010



Gambar 5.5 Diagram Jumlah Penduduk Kota Makassar

Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa penyebaran penduduk kota Makassar setelah dirinci menurut Kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang paling rendah adalah kecamatan Ujungpandang dengan jumlah penduduk 29.064 jiwa atau sekitar 2,28 persen dari jumlah penduduk yang bermukim di kota Makassar.

Secara keruangan kondisi penduduk Kota Makassar dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini:



Gambar. 5.6 Peta Jumlah Penduduk Kota Makassar

Kepadatan Penduduk

Suatu fenomena wilayah perkotaan yang umum terjadi adalah terlihat terjadinya peningkatan kepadatan penduduk yang semakin bertambah, sejalan bertambahnya jumlah kelahiran dan urbanisasi.

Ditinjau dari kepadatan penduduk Kondisi lahan kota Makassar yang sempit dengan pertumbuhan penduduk semakin tinggi membuat kepadatan penduduk kota semakin tinggi. Luas lahan di kota Makassar hanya sekitar 175,77 Ha dengan jumlah penduduk 1.272.349 jiwa sehingga kepadatan penduduk kelurahan ini mencapai 7.239 orang per hektarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

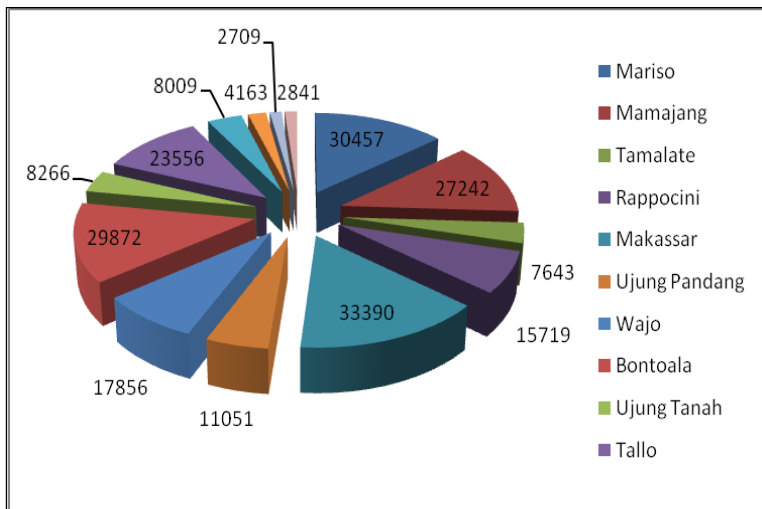
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Mariso	1,82	55.431	30.457
2	Mamajang	2,25	61.294	27.242
3	Tamalate	20,21	154.464	7.643
4	Rappocini	9,23	145.090	15.719
5	Makassar	2,52	84.143	33.390
6	Ujung Pandang	2,63	29.064	11.051
7	Wajo	1,99	35.533	17.856
8	Bontoala	2,1	62.731	29.872
9	Ujung Tanah	5,94	49.103	8.266
10	Tallo	5,83	137.333	23.556
11	Panakukang	1,05	136.555	8.009

12	Manggal a	24,1 4	100.484	4.163
13	Biringkan ayya	48,2 2	130.651	2.709
14	Tamalanr ea	31,8 4	90.473	2.841
Jumlah		175, 77	1.272.349	7.239

Sumber : Makassar dalam angka, 2010

Berdasarkan tabel di atas kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah yang terpadat dengan jumlah kepadatan mencapai 33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso sebesar 30.457 jiwa per km persegi, kecamatan Bontoala sebesar 29.872 jiwa per km persegi. Sedangkan kecamatan Biringkanayya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea sebesar 2.841 jiwa per km persegi, kecamatan Ujung Tanah sebesar 8.266

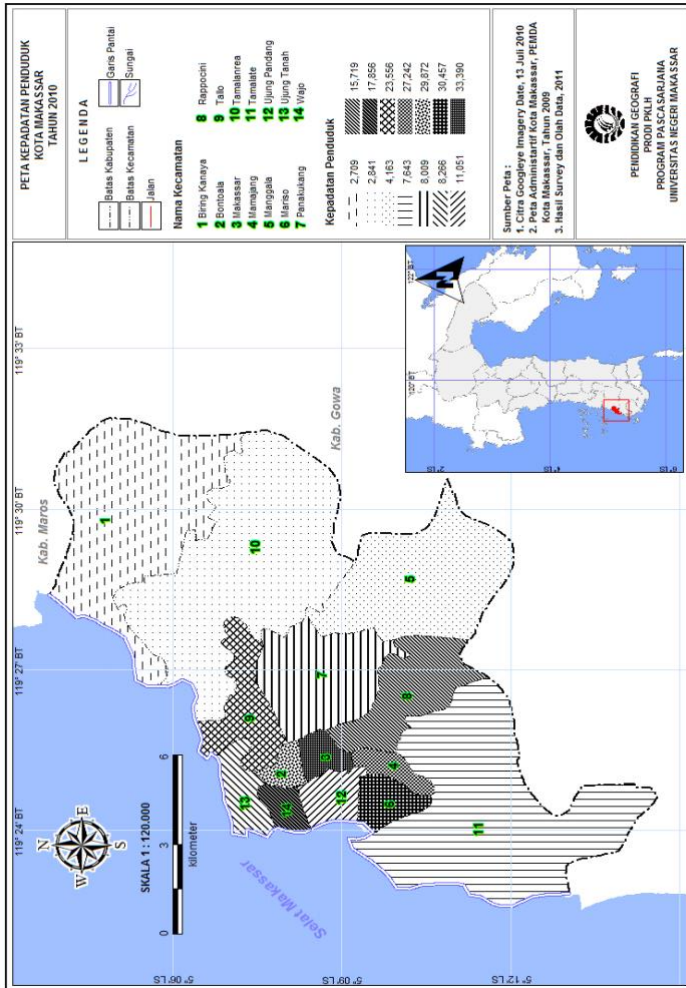
jiwa per km persegi, dan kecamatan Panakukang sebesar 8.009 jiwa per km persegi. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 4.7 berikut ini:



Gambar 5.7 Diagram Kepadatan Penduduk Kota Makassar

Dengan melihat tingkat laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di wilayah perkotaan yang semakin meningkat memungkinkan wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih

memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman utamanya di tiga wilayah kecamatan yaitu kecamatan Biringkanayya, kecamatan Tamalanrea, dan kecamatan Manggala. Secara keruangan kondisi kepadatan penduduk Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut.

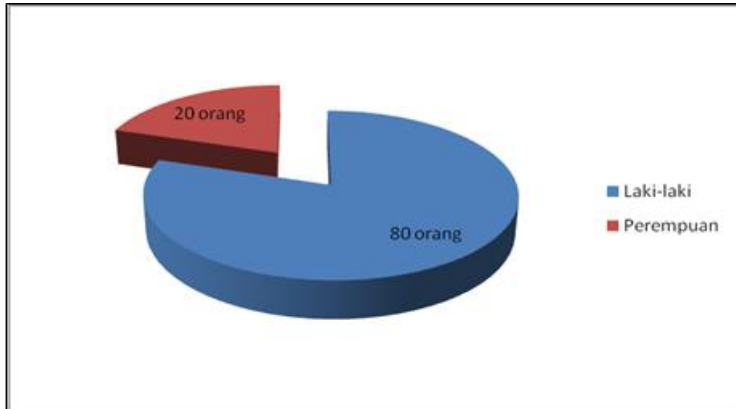


Gambar. 4.8 Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar

Untuk melihat lebih rinci kondisi karakteristik rumahtangga dari segi jenis kelamin responden di Kota Makassar yaitu pada tabel dan gambar berikut:

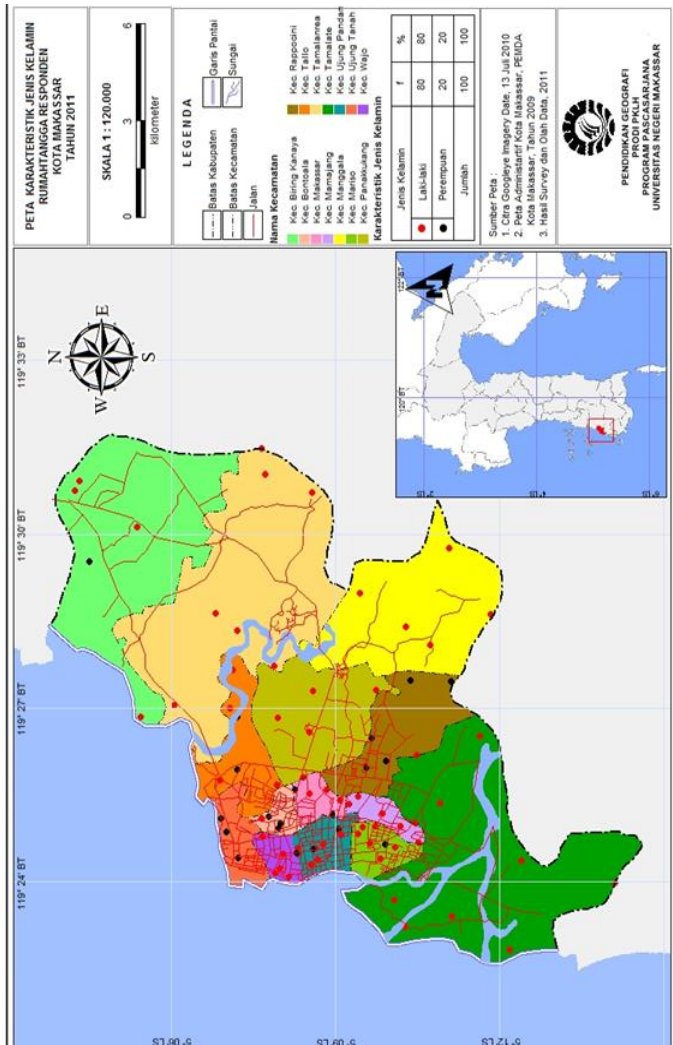
No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	80	80
2	Perempuan	20	20
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 4.9 Diagram Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Dari data di atas terlihat ada 80 orang laki-laki dan 20 orang perempuan dari 100 orang responden yang diambil secara acak (random) dari masing-masing kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah kota Makassar. Secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



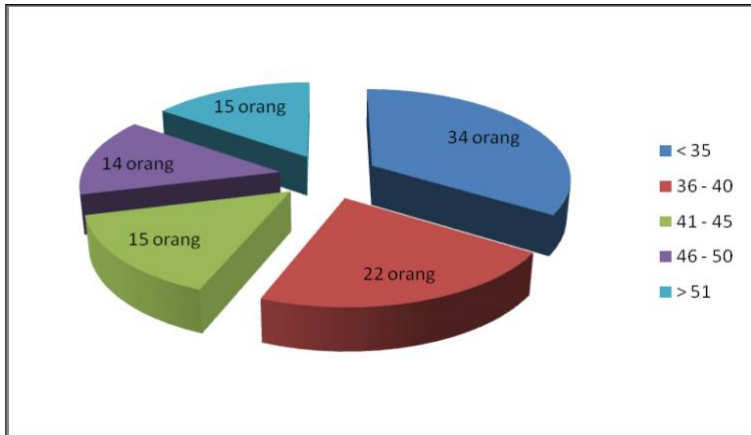
Gambar. 5.10 Peta Distribusi Karakteristik Jenis Kelamin Responden Kota Makassar

Umur Responden

Umur merupakan hal yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas seseorang, oleh karena pada umur tertentu seseorang dapat melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengetahui distribusi umur responden di kota Makassar dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini.

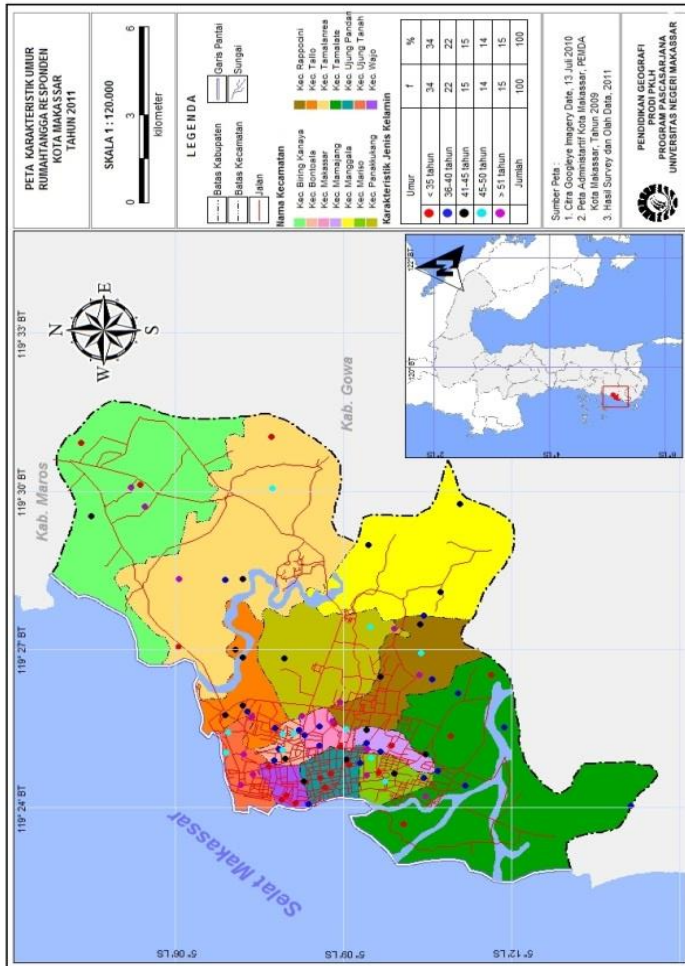
No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 35	34	34
2	36 - 40	22	22
3	41 - 45	15	15
4	46 - 50	14	14
5	> 51	15	15
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 5.11 Diagram Karakteristik Umur Responden

Berdasarkan tabel di atas, umur responden di kota Makassar paling tinggi berada di kisaran kurang dari 35 tahun sebesar 34 orang, dan yang paling rendah berada pada kisaran 46 sampai 50 tahun yang jumlahnya mencapai 14 orang dari total responden.



Gambar. 5.12 Peta Distribusi Karakteristik Umur Responden Kota Makassar

Agama Responden

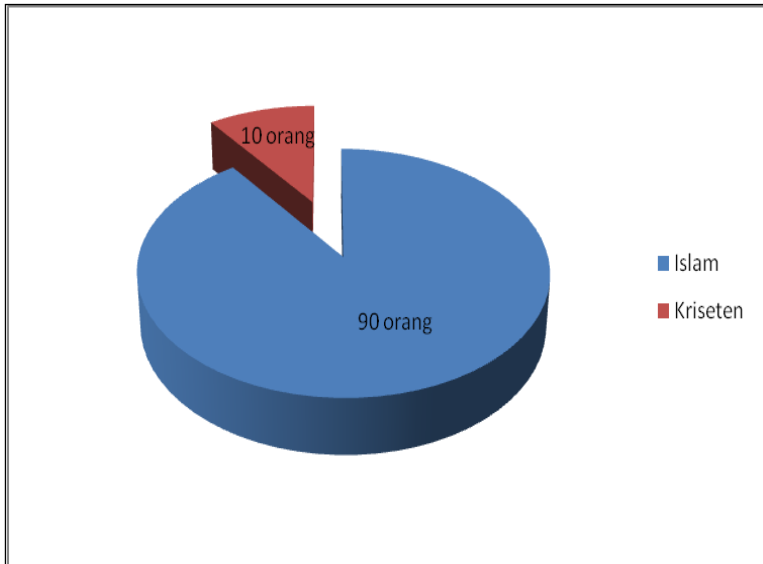
Agama adalah kepercayaan yang dianut atau suatu ideologi dari seorang responden. karakteristik rumahtangga responden berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Agama	Frekuensi	Persentase (%)
1	Islam	90	90
2	Kristen	10	10
Jumlah		100	100

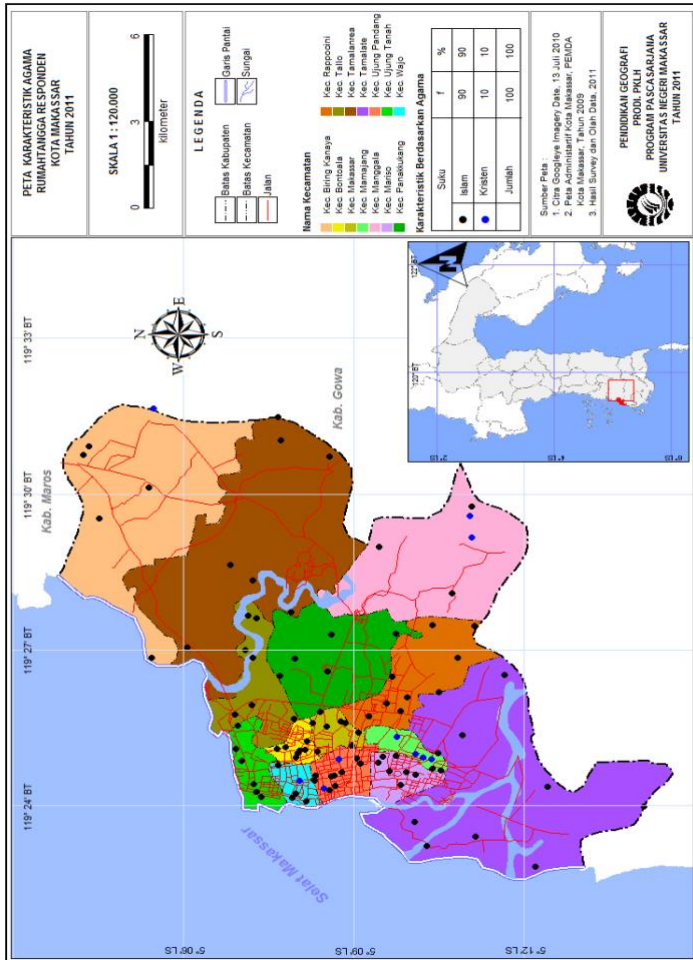
Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

Data di atas menunjukkan bahwa agama islam merupakan agama mayoritas responden di kota Makassar dengan jumlah responden 90 orang atau sekitar 90 % dan selebihnya adalah agama kristen yaitu hanya 10 orang atau 10 % dari keseluruhan responden.

Untuk lebih jelas perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.13 Diagram Karakteristik Agama Responden



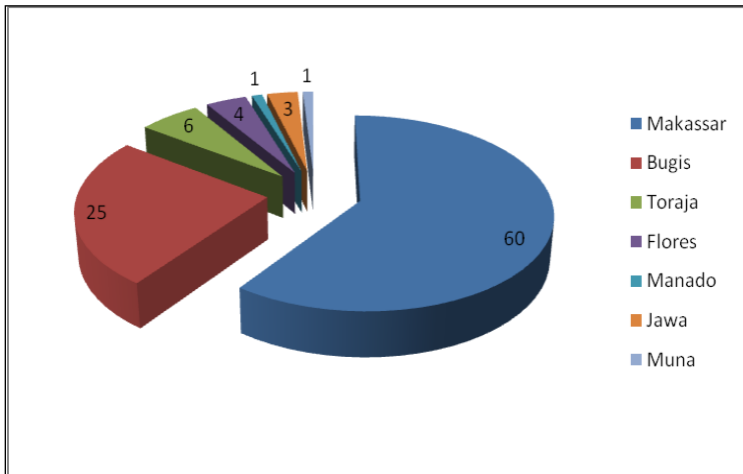
Gambar. 5.14 Peta Distribusi Karakteristik Agama Responden Kota Makassar

Suku Responden

Suku asli penduduk Kota Makassar adalah Makassar, dan suku lainnya yang berada di kota tersebut merupakan pendatang, baik dari asal kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan. Pada Tabel berikut menyajikan asal suku responden.

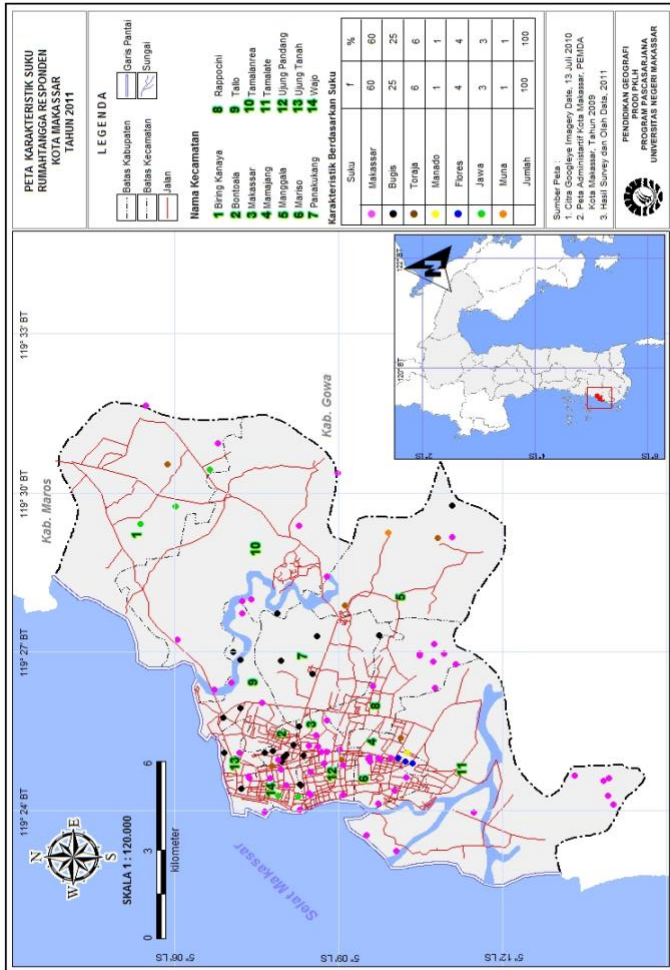
No	Suku	Frekuensi	Persentase (%)
1	Makassar	60	60
2	Bugis	25	25
3	Toraja	6	6
4	Flores	4	4
5	Manado	1	1
6	Jawa	3	3
7	Muna	1	1
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 5.15 Diagram Karakteristik Suku Responden

Mayoritas suku responden adalah Makassar (60%) dan Bugis (25%). Suku lainnya adalah Toraja (6%), Jawa (3%), dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa masyarakat Kota Makassar heterogen dan memiliki beragam etnis suku.



Gambar. 5.16 Peta Distribusi Karakteristik Suku Responden Kota Makassar

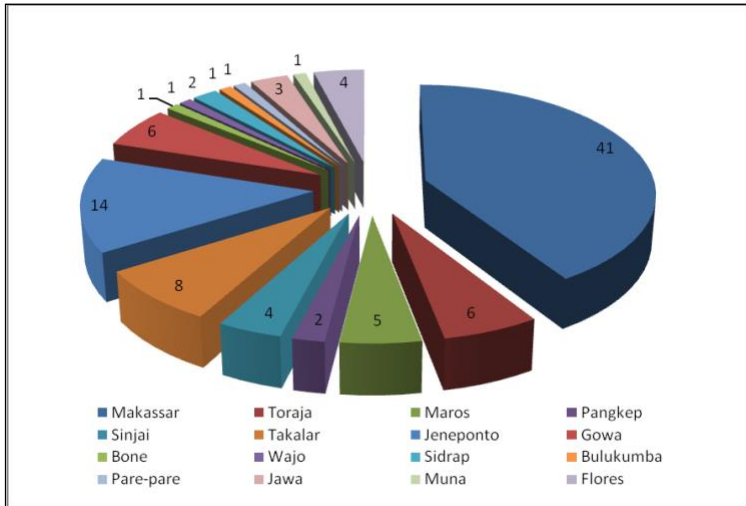
Daerah Asal

Daerah asal merupakan tempat kelahiran responden sebelum melakukan mobilitas atau perpindahan, pada umumnya daerah asal responden adalah Makassar sendiri, dan daerah lainnya baik dari asal kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, untuk mengetahui daerah asal lain responden di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

No	Suku	Frekuensi	Persentase (%)
1	Makassar	41	41
2	Toraja	6	6
3	Maros	5	5
4	Pangkep	2	2
5	Sinjai	4	4
6	Takalar	8	8

7	Jeneponto	14	14
8	Gowa	6	6
9	Bone	1	1
10	Wajo	1	1
11	Sidrap	2	2
12	Bulukumba	1	1
13	Pare-pare	1	1
14	Jawa	3	3
15	Muna	1	1
16	Flores	4	4
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

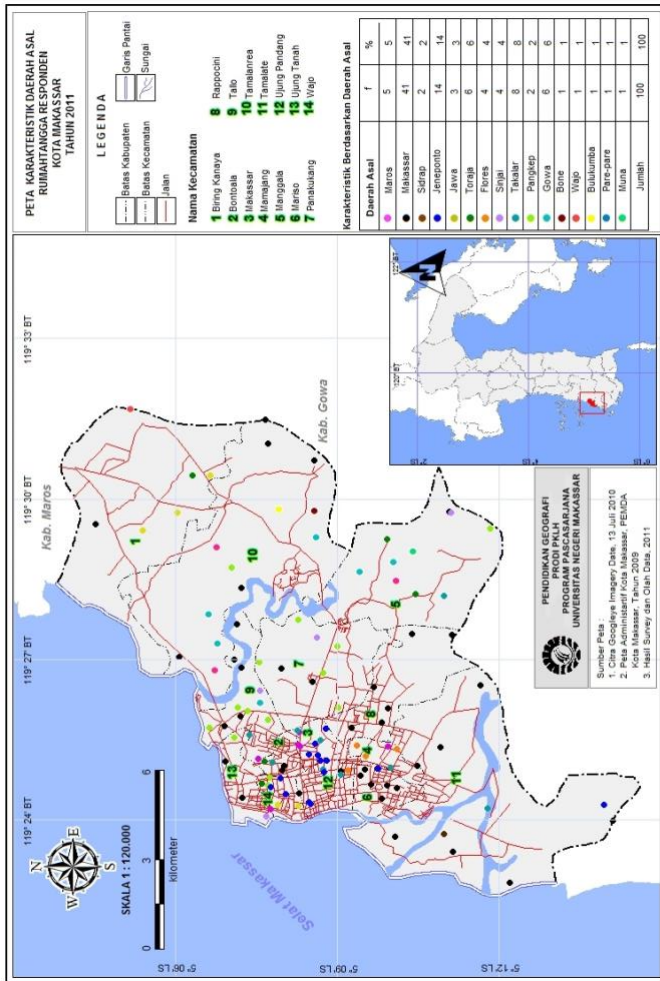


Gambar 5.17 Diagram Karakteristik Daerah Asal Responden

Sekitar 41% responden merupakan penduduk asli Kota Makassar dan lebih dari setengahnya merupakan pendatang dari luar Kota Makassar baik dari dalam Sul-Sel seperti Jenepono 14 %, Takalar 8 %, Gowa 6 % maupun dari luar Sul-Sel seperti Flores 4 %, Jawa 3 % dan Muna 1 %. Responden dengan status migran apabila mereka dilahirkan di luar Kota Makassar, yaitu sebesar 57,9%. Hal ini menandakan bahwa kota Makassar

merupakan salah satu tujuan mobilitas penduduk di kawasan Indonesia bagian timur.

Secara keruangan distribusi daerah asal responden yang tinggal di kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar. 5.18 Peta Distribusi Karakteristik Daerah Asal Responden Kota Makassar

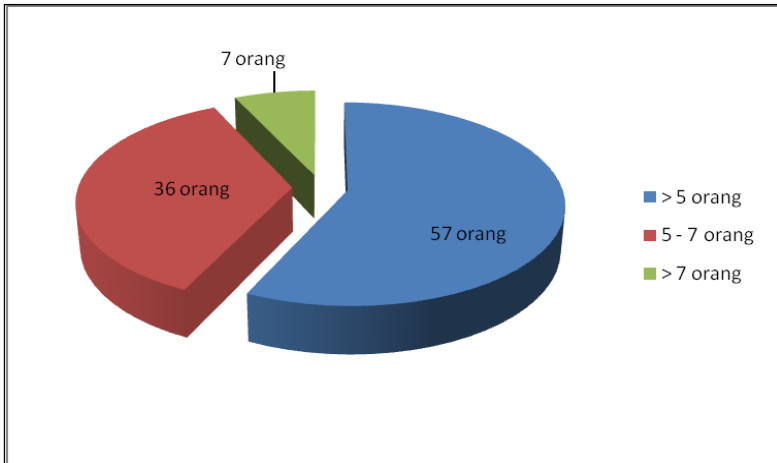
Jumlah Keluarga

Jumlah Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal bersama dengan responden secara langsung dibiayai dalam kehidupan sehari-hari seperti istri, anak, serta keluarga lainnya dan termasuk diri responden sendiri.

Karakteristik jumlah keluarga responden untuk lebih jelas disajikan pada tabel berikut dan pada gambar berikut.

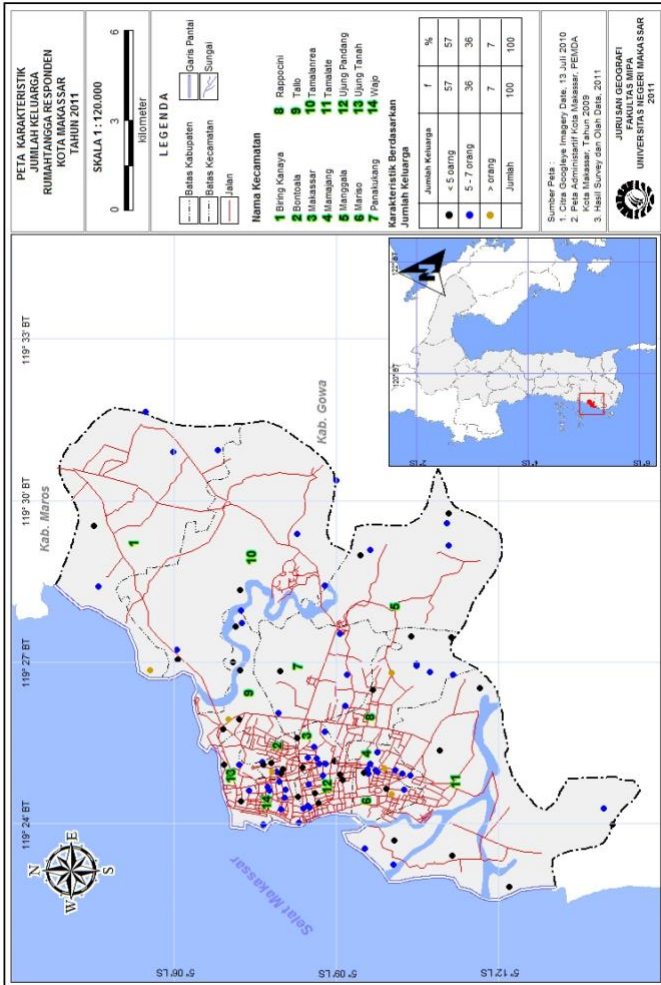
No	Jumlah Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	> 5 orang	57	57
2	5 - 7 orang	36	36
3	> 7 orang	7	7
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 5.19 Diagram Karakteristik Jumlah Keluarga Responden

Dari tabel di atas jumlah keluarga responden didominasi kurang dari 5 orang yaitu lebih separuh dari responden atau sekitar 57 orang (57%), sebaran karakteristik jumlah keluarga responden ini secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar. 5.20 Peta Distribusi Karakteristik Jumlah Keluarga Responden Kota Makassar

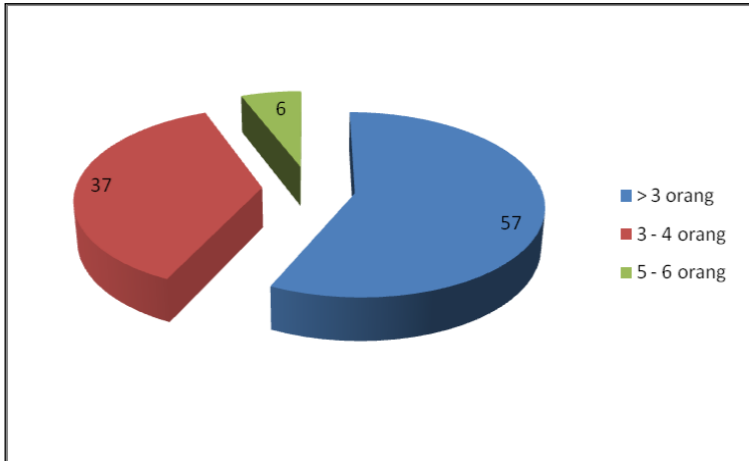
Jumlah Anak

Jumlah anak yang dimaksud adalah jumlah anak yang masih hidup dan masih dalam tanggungan keluarga. Untuk mengetahui jumlah anak dari responden di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	> 3 orang	57	57
2	3 - 4 orang	37	37
3	5 - 6 orang	6	6
Jumlah		100	100

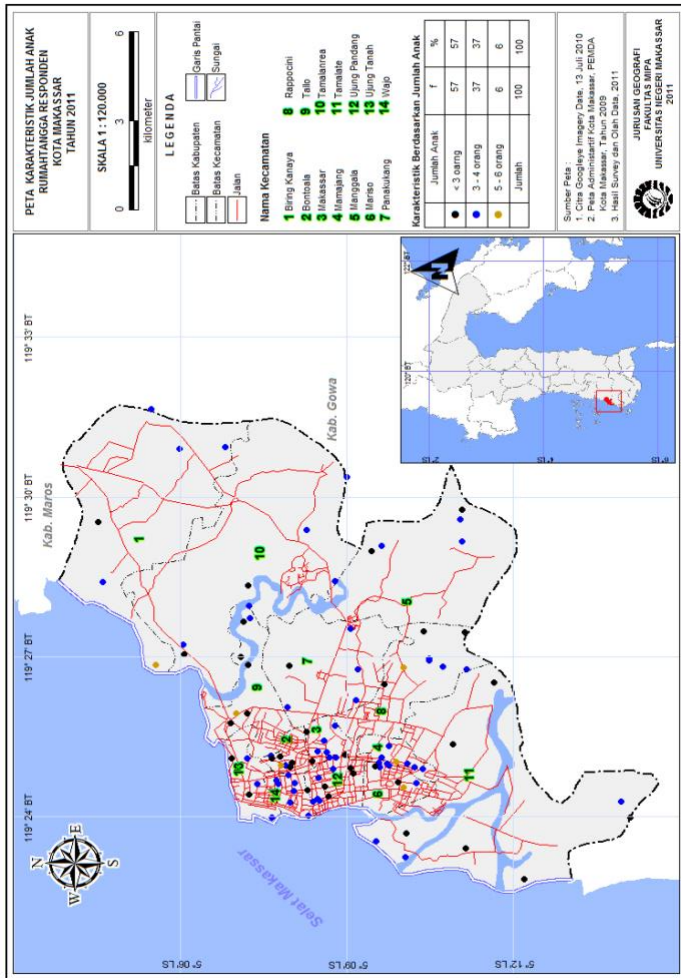
Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

Dari tabel di atas rata-rata responden di Kota Makassar memiliki anak kurang dari 3 orang dengan frekuensi 57 orang dan paling sedikit responden yang memiliki anak antara 5 sampai 6 orang yaitu hanya 6 orang responden.



Gambar 5.21 Diagram Karakteristik Jumlah Anak Responden

Sebaran karakteristik jumlah anak responden tersebut dapat dilihat secara keruangan yaitu sebagai berikut:



Gambar. 5.22 Peta Distribusi Karakteristik Jumlah Anak Responden Kota Makassar

EMPAT BELAS INDIKATOR MASYARAKAT KOTA

BAB

VI

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal

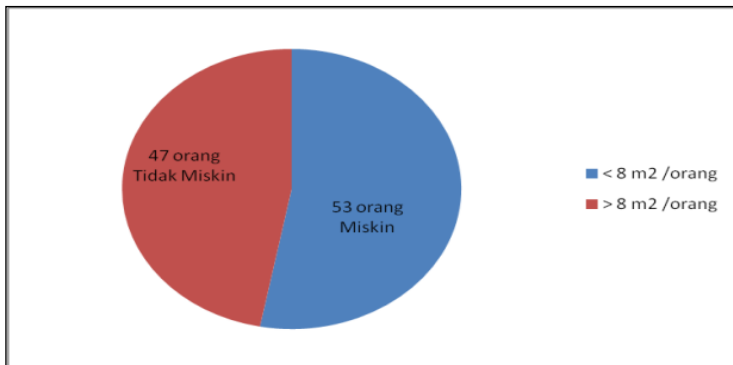
Kriteria dimana suatu rumahtangga dikatakan miskin apabila luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, cara ini diperoleh dengan melakukan pendataan luas bangunan rumah dan jumlah orang dalam satu keluarga. Untuk lebih jelasnya kondisi luas lantai bangunan rumah dari rumahtangga responden yaitu:

Tabel 4.12 Indikator Kemiskinan Luas Lantai Bangunan Rumah

No	Luas Lantai Frekuensi /orang	Kategori	Persentase (%)
1	< 8 m ² /orang	Miskin	53
2	> 8 m ² /orang	Tidak Miskin	47
Jumlah		100	100

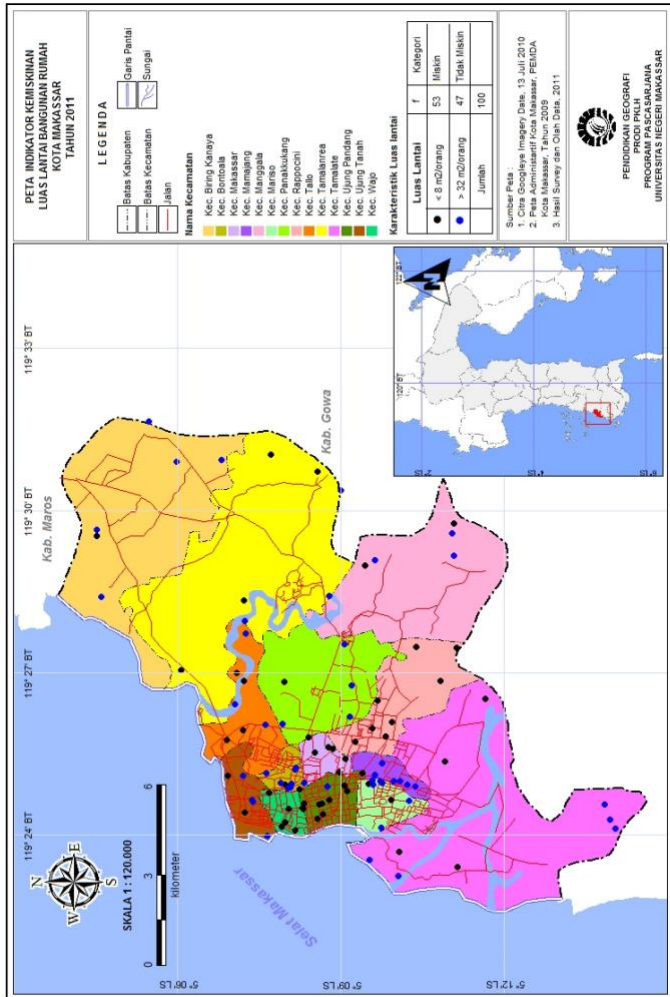
Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

Perbandingannya dapat dilihat secara jelas pada gambar berikut:



Gambar 6.1 Diagram Indikator Kemiskinan Luas Lantai Rumah

Sebaran Indikator Kemiskinan Luas Lantai Rumah tersebut dapat dilihat secara keruangan yaitu sebagai berikut:



Gambar. 6.2 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Luas Lantai Bangunan Rumah di Kota Makassar

Jenis Lantai Bangunan Tempat Tinggal

Kriteria kemiskinan untuk jenis lantai bangunan tempat tinggal biasanya lantai rumah yang terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan atau kayu berkualitas rendah. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jenis lantai bangunan rumah setiap rumahtangga responden yaitu sebagai berikut:

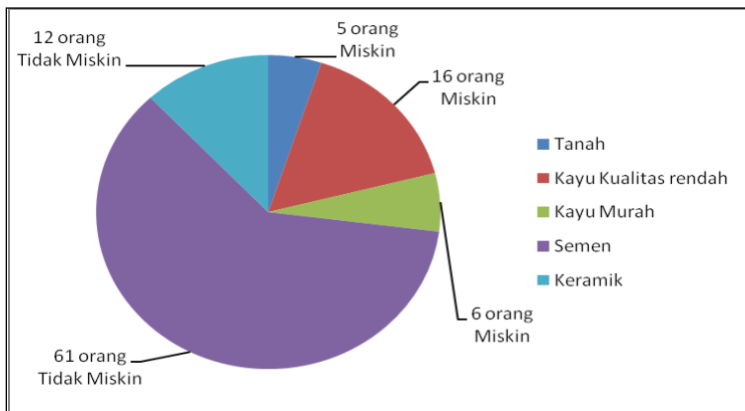
No	Jenis Lantai	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Tanah	5	Miskin	5
2	Kayu Kualitas rendah	16	Miskin	16
3	Kayu Murah	6	Miskin	6
5	Semen	61	Tidak Miskin	61
6	Keramik	12	Tidak	12

Miskin

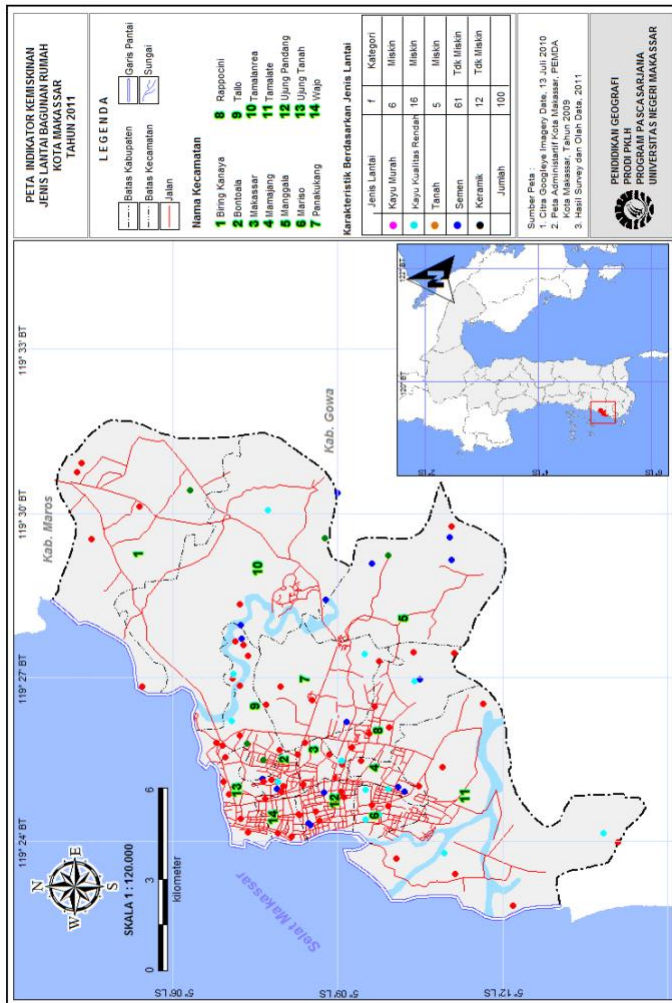
Jumlah	100	-	100
---------------	------------	----------	------------

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

Dari data di atas menunjukkan bahwa sekitar 27 % responden menggunakan jenis lantai tanah, kayu kualitas rendah, dan kayu murah yang dikategorikan dalam miskin dan sekitar 73 % menggunakan jenis lantai keramik, dan semen yang dikategorikan ke dalam rumahtangga tidak miskin.



Gambar 6.3 Diagram Indikator Kemiskinan Jenis Lantai Rumah



Gambar. 6.4 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Jenis Lantai Bangunan Rumah di Kota Makassar

Jenis Dinding Bangunan Tempat Tinggal

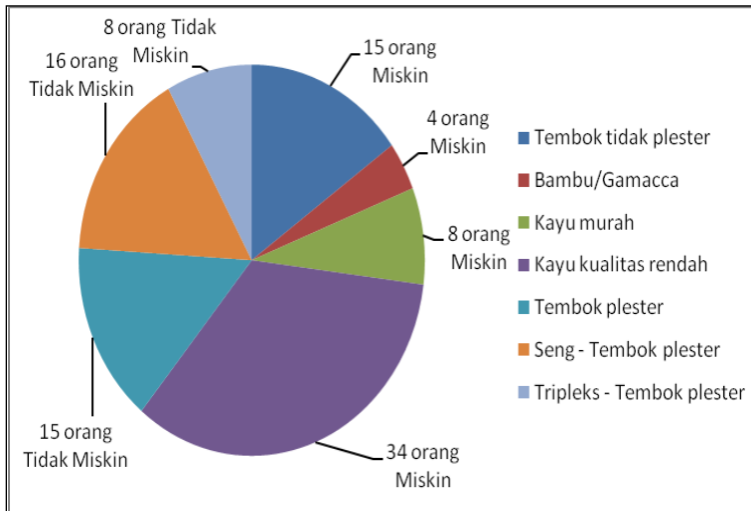
Kriteria kemiskinan untuk jenis dinding bangunan tempat tinggal biasanya dinding rumah yang terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa plester. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis dinding rumah tangga responden dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Jensi Dinding	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Tembok tidak plester	15	Miskin	15
2	Bambu/Gamacc a	4	Miskin	4
3	Kayu murah	8	Miskin	8
4	Kayu kualitas rendah	34	Miskin	34
5	Tembok plester	15	Tidak Miskin	15
6	Seng - Tembok	16	Tidak	16

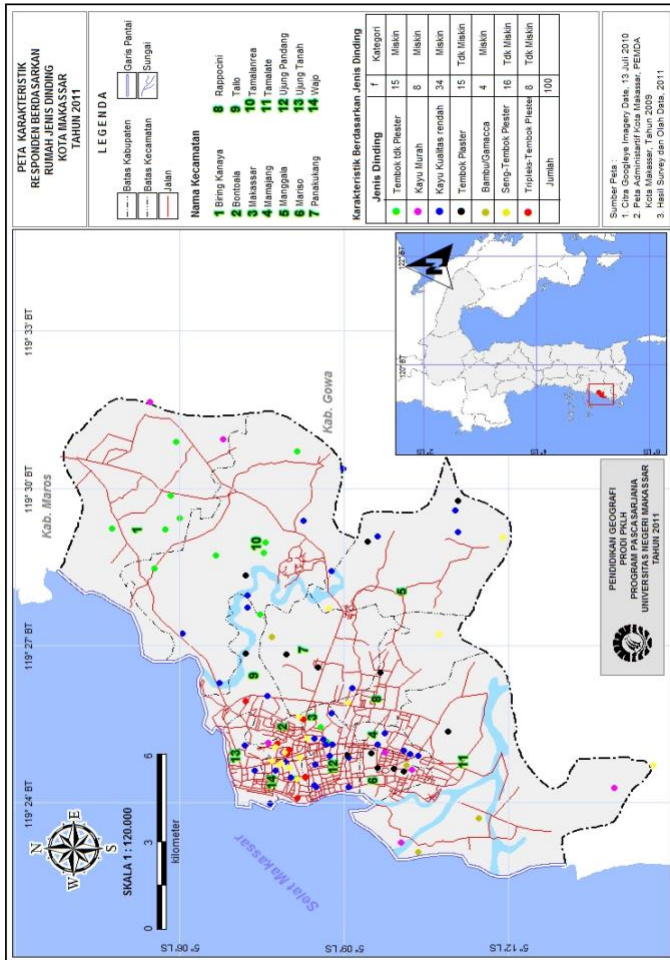
plester		Miskin		
7	Tripleks - Tembok plester	8	Tidak Miskin	8
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

Dari data di atas menunjukkan bahwa sekitar 61 % dikategorikan dalam rumahtangga miskin dan sekitar 39 % dikategorikan tidak miskin.



Gambar 6.5 Diagram Indikator Kemiskinan Jenis Dinding Rumah.



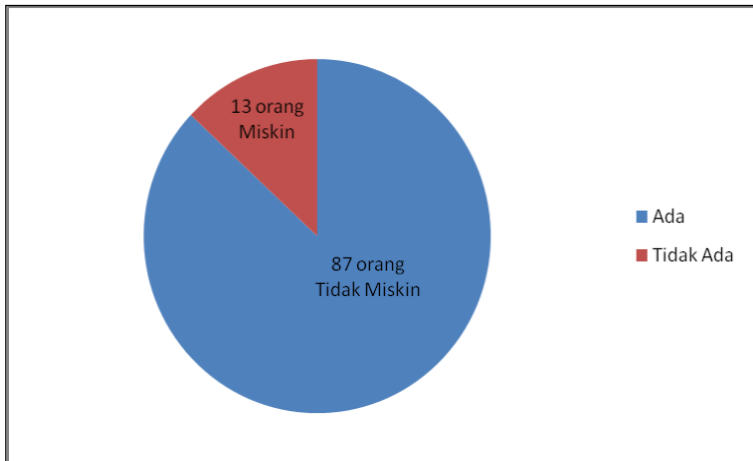
Gambar. 6.6 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Jenis Dinding Bangunan Rumah di Kota Makassar

Fasilitas Buang Air Besar

Suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika mereka tidak memiliki fasilitas buang air besar atau mereka memiliki fasilitas tapi bersama-sama dengan rumah tangga lain, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

No	Fasilitas	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Ada	87	Tidak Miskin	87
2	Tidak Ada	13	Miskin	13
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.7 Diagram Indikator Kemiskinan Fasilitas Buang Air Besar

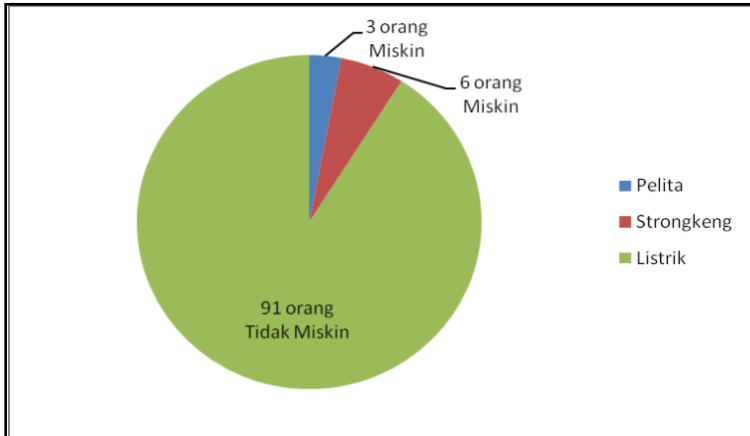
Dari tabel di atas jumlah rumahtangga responden yang tidak memiliki fasilitas buang air besar atau mereka memiliki fasilitas tapi bersama-sama dengan rumah tangga lain yaitu sebanyak 13 KK dan ini dikategorikan sebagai rumahtangga miskin, Sebaran rumahtangga miskin menurut indikator ini secara keruangan disajikan pada gambar berikut ini:

Fasilitas Sumber Penerangan Rumahtangga

Suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika mereka memiliki fasilitas sumber penerangan rumahtangga yang tidak menggunakan listrik, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada table dan diagram berikut:

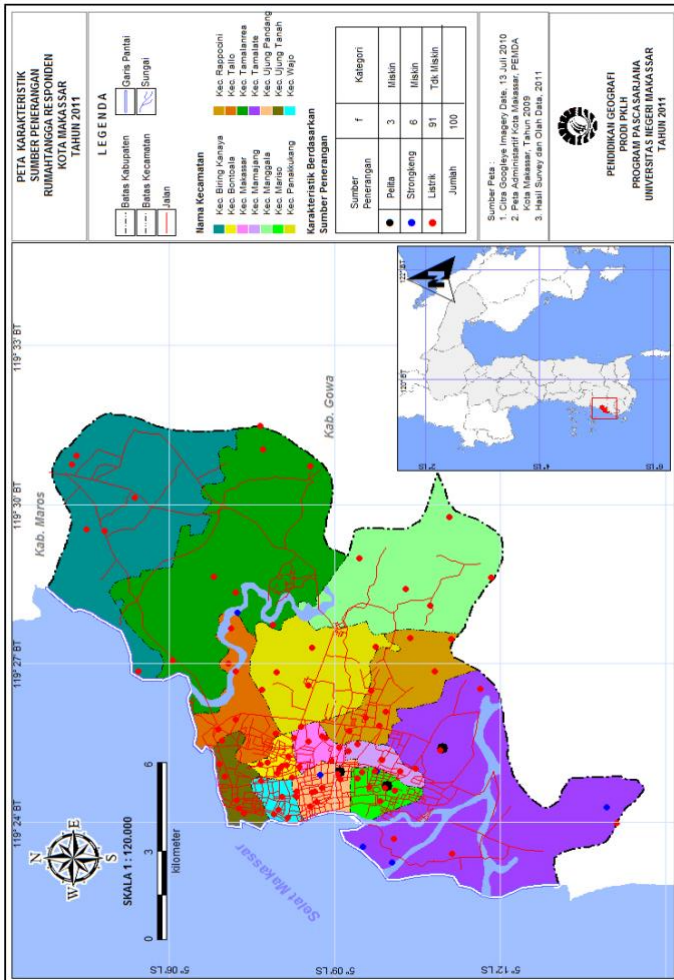
No	Sumber Listrik	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Pelita	3	Miskin	3
2	Strongkeng	6	Miskin	6
3	Listrik	91	Tidak Miskin	91
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.9 Diagram Indikator Kemiskinan Sumber Penerangan

Dari tabel di atas bahwa, dari 100 responden 9 KK diantaranya merupakan kategori miskin dimana masih menggunakan sumber penerangan lampu strongkeng dan pelita. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. 6.10 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Sumber Penerangan Rumah di Kota Makassar

Sumber Air Minum

Suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindungi, kanal, dan air hujan. adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

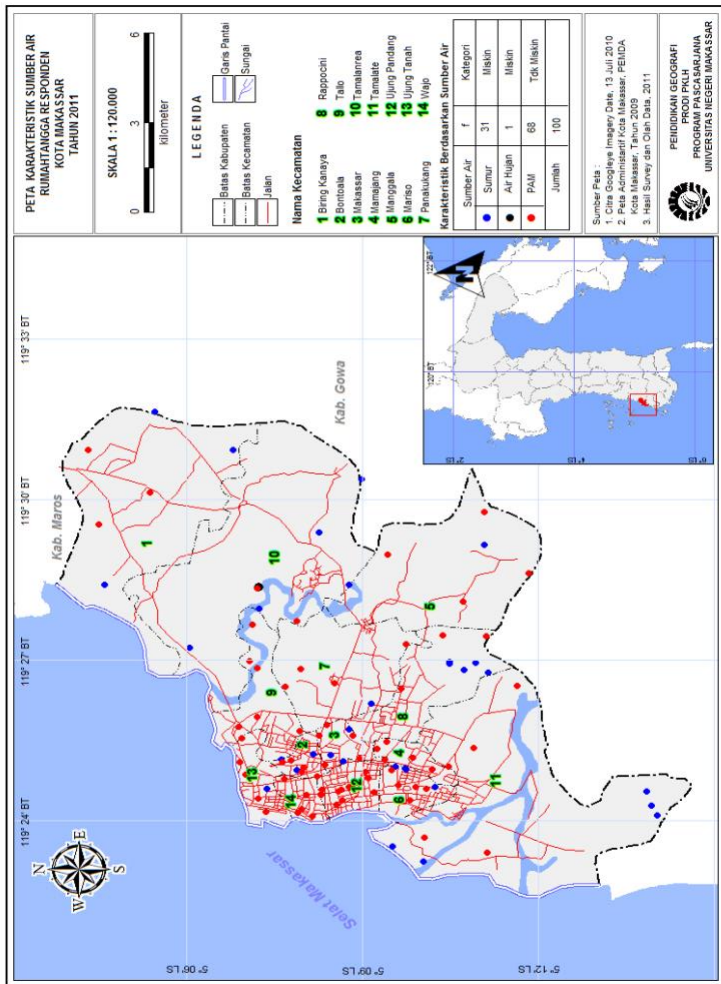
No	Sumber Air Minum	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	PAM	68	Tidak Miskin	68
2	Sumur	31	Miskin	31
3	Air Hujan	1	Miskin	1
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.11 Diagram Indikator Kemiskinan Sumber Air Minum

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada sekitar 32 % responden masih menggunakan sumur dan air hujan sebagai sumber air minum dan untuk mencuci dan ini dikategorikan sebagai rumahtangga miskin. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



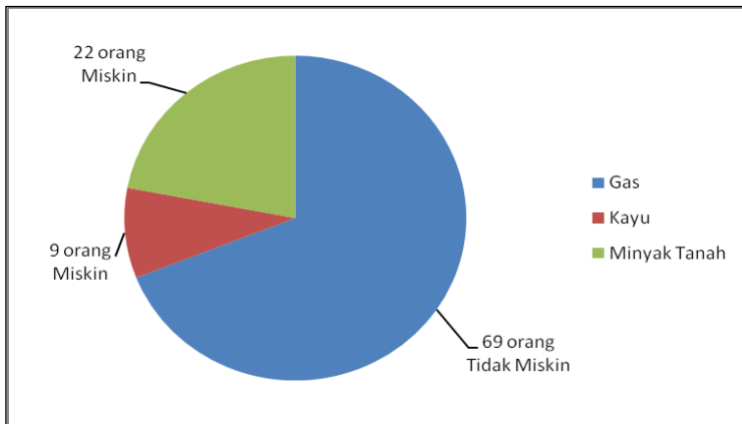
Gambar. 6.12 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Sumber Air Minum Rumah Tangga di Kota Makassar

Bahan Bakar

Suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika bahan bakar untuk memasak sehari-hari berasal dari kayu bakar, arang atau minyak tanah. adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

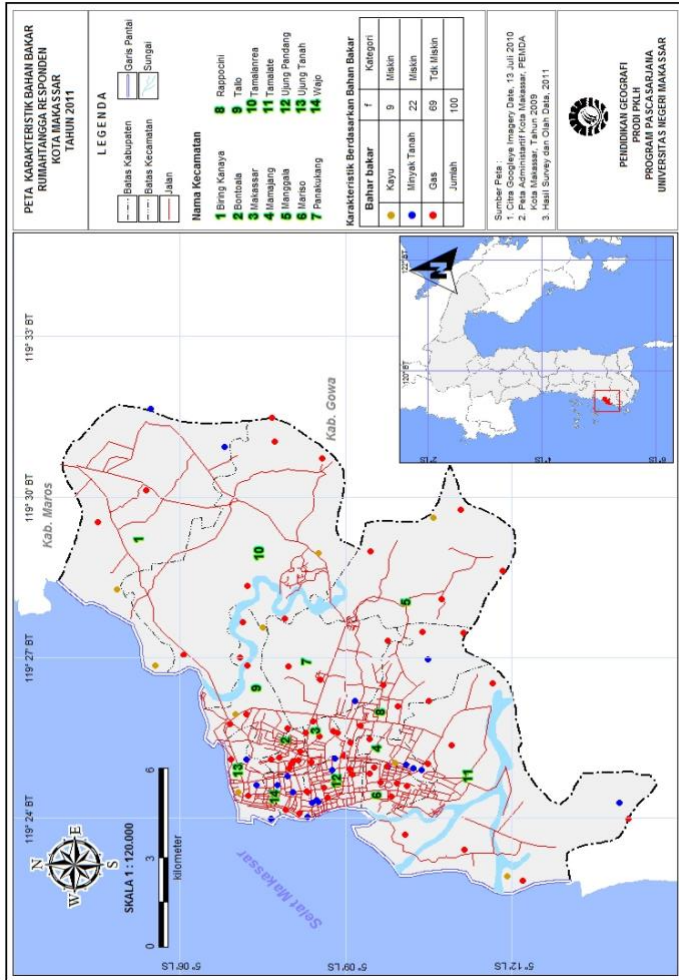
No	Bahan Bakar	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Gas	69	Tidak Miskin	69
2	Kayu	9	Miskin	9
3	Minyak Tanah	22	Miskin	22
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.13 Diagram Indikator Kemiskinan Bahan Bakar

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada sekitar 22 % responden masih menggunakan minyak tanah, dan 9 % responden menggunakan kayu sebagai bahan bakar dan ini dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



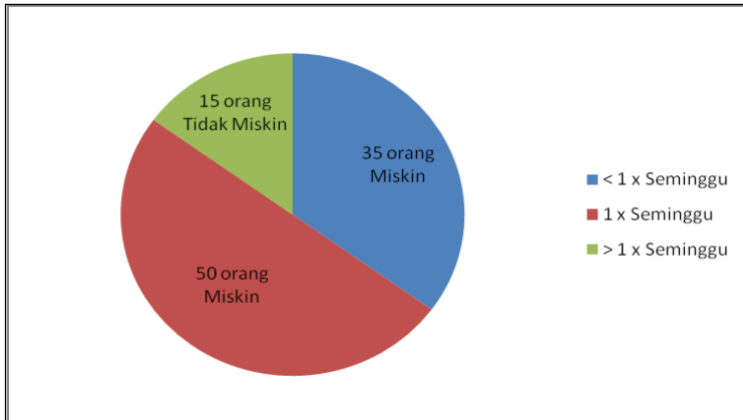
Gambar. 6.14 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Sumber Bahan Bakar Rumah Tangga di Kota Makassar

Konsumsi Daging

Suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika hanya mampu mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu. adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

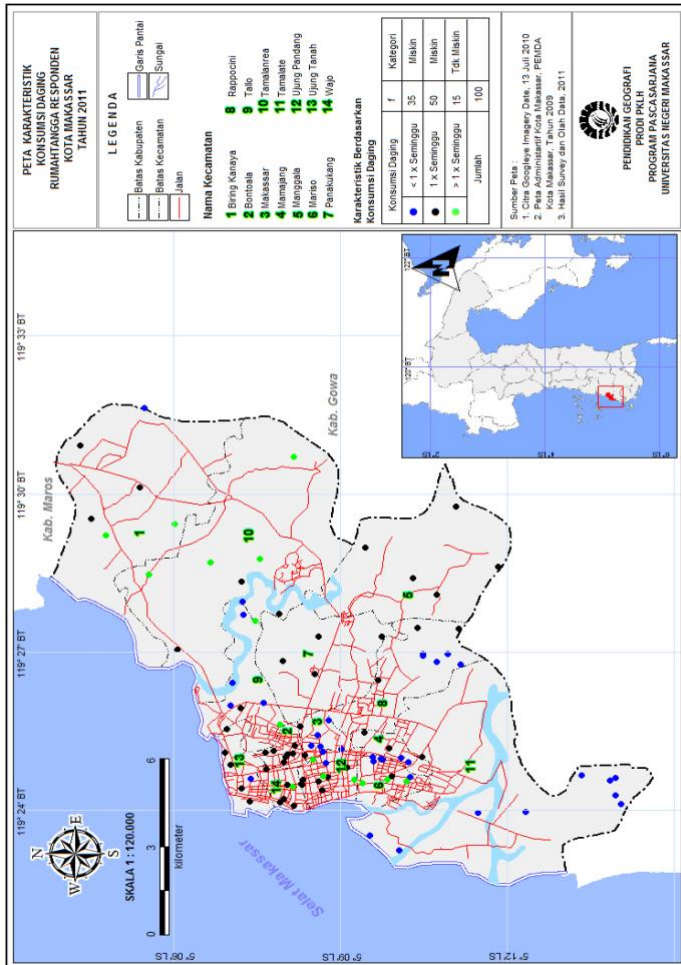
No	Konsumsi Daging	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	< 1 x Seminggu	35	Miskin	35
2	1 x Seminggu	50	Miskin	50
3	> 1 x Seminggu	15	Tidak Miskin	15
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.15 Diagram Indikator Kemiskinan Konsumsi Daging

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada sekitar 35 % responden yang hanya mengonsumsi daging di atas seminggu sekali, dan 50 % responden sekali dalam seminggu, ini dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut



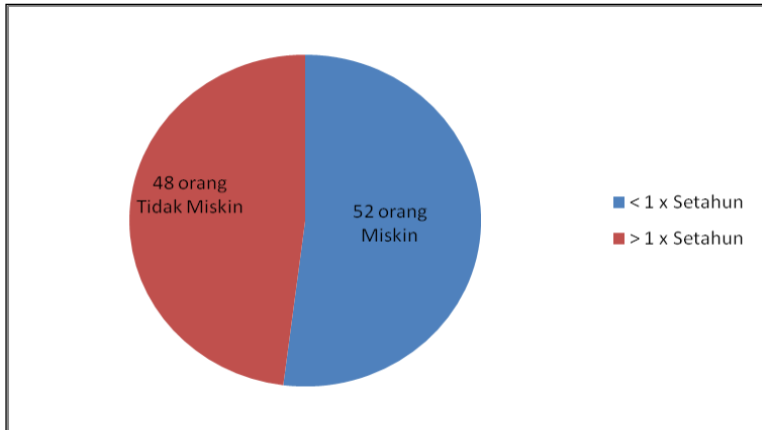
Gambar. 6.16 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Konsumsi Daging Rumah Tangga di Kota Makassar

Belanja Pakaian

Suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika mereka hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada table dan diagram berikut:

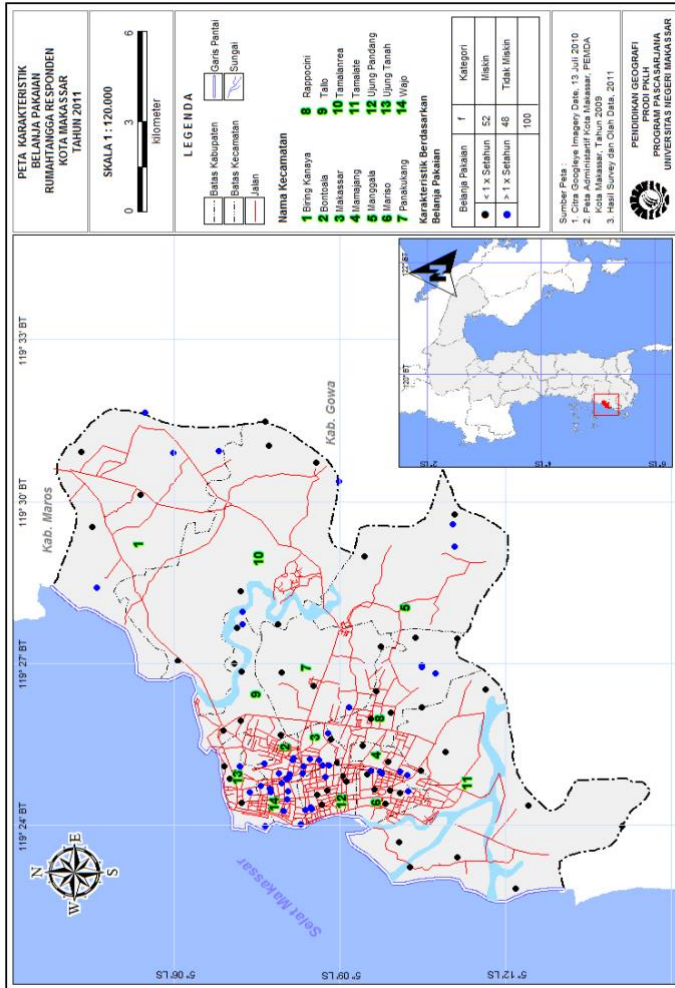
No	Membeli Pakaian	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	< 1 x Setahun	52	Miskin	52
2	> 1 x Setahun	48	Tidak Miskin	48
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.17 Diagram Indikator Kemiskinan Belanja Pakaian

Dari tabel di atas bahwa, dari 100 responden 52 KK diantaranya merupakan kategori miskin dimana mereka hanya sanggup belanja atau membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. 6.18 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Belanja Pakaian Rumah Tangga di Kota Makassar

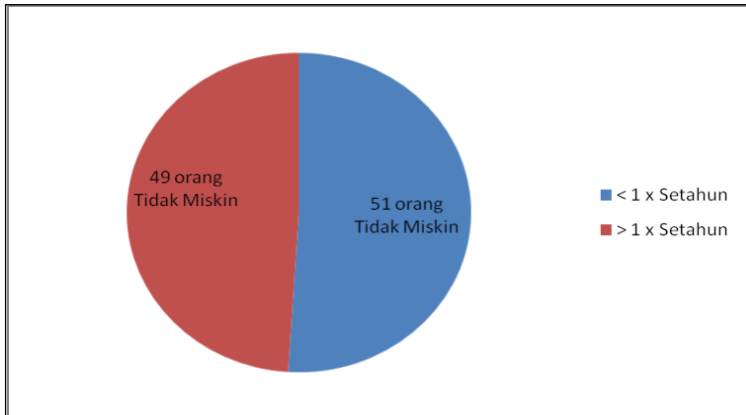
Kesanggupan Makan Sehari

Indikator suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika mereka hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

Tabel 4.21 Indikator Kemiskinan Kesanggupan Makan Sehari

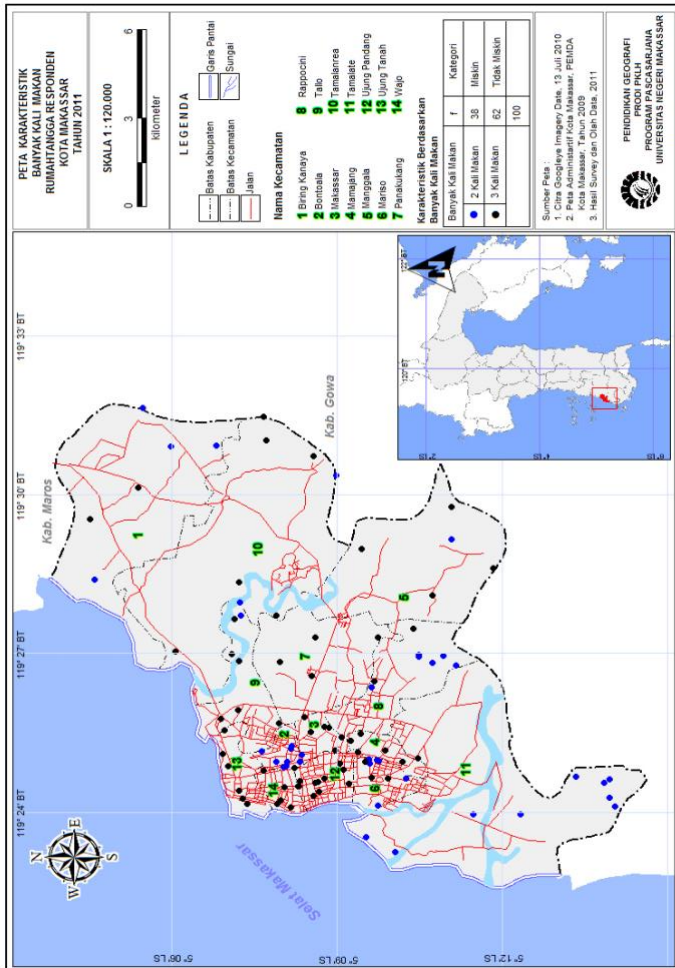
No	Makan	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	2 x sehari	38	Miskin	38
2	3 x sehari	62	Tidak Miskin	62
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.19 Diagram Indikator Kemiskinan Kesanggupan Makan

Dari tabel di atas bahwa, dari 100 responden 38 KK diantaranya merupakan kategori miskin dimana mereka hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. 6.20 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Kesanggupan makan Rumah Tangga di Kota Makassar

Kesanggupan Membayar Pengobatan

Indikator suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika mereka tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di poliklinik, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

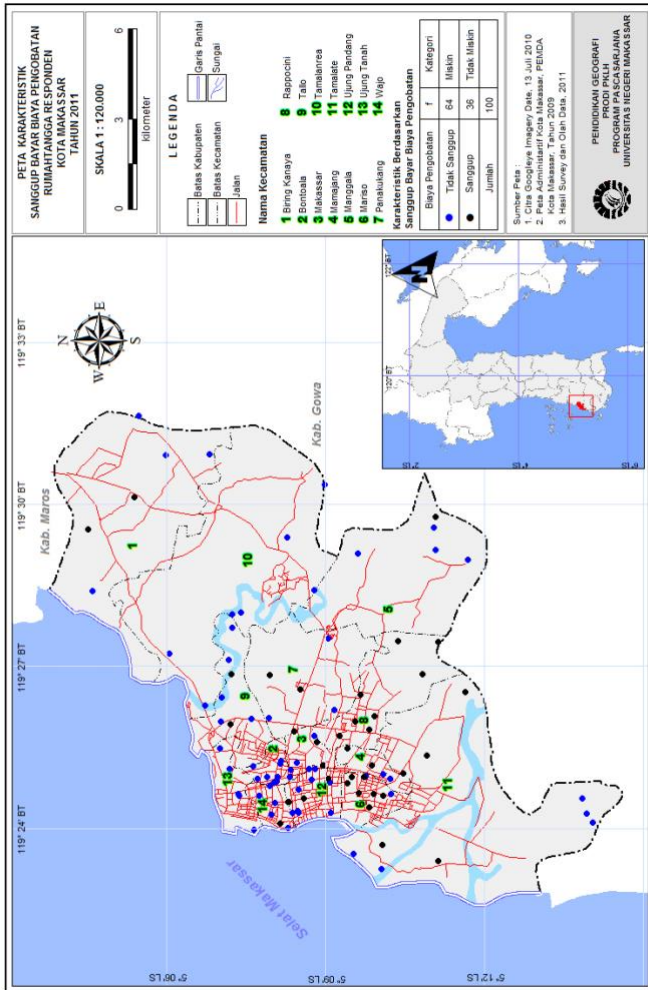
No	Bayar Pengobatan	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Sanggup	64	Miskin	64
2	Tidak Sanggup	36	Tidak Miskin	36
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.21 Diagram Indikator Kemiskinan Membayar Pengobatan

Dari tabel di atas bahwa, dari 100 responden 64 KK diantaranya merupakan kategori miskin dimana mereka tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas atau poliklinik. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. 6.22 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Kesanggupan Membayar Biaya Pengobatan Rumah Tangga di Kota Makassar

Sumber Penghasilan

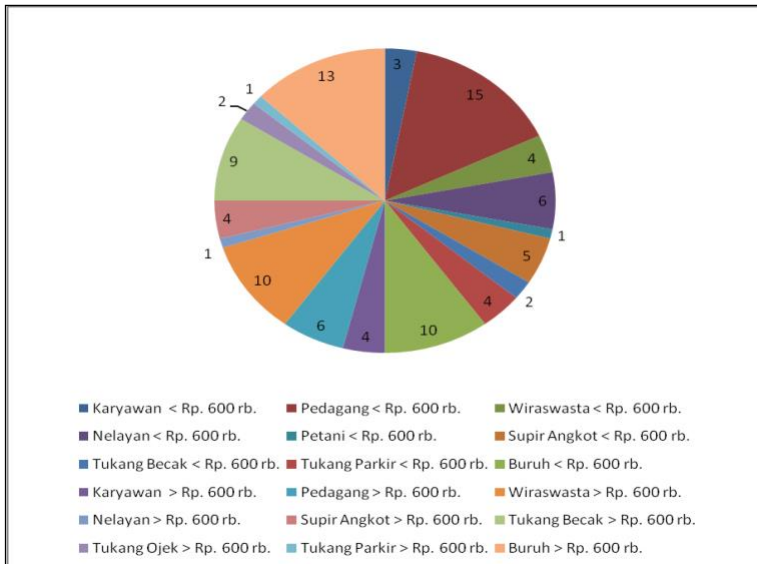
Indikator suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

No	Pekerjaan	Penghasilan	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Karyawan	< Rp. 600 rb.	3	Miskin	3
2	Pedagang	< Rp. 600 rb.	15	Miskin	15
3	Wiraswasta	< Rp. 600 rb.	4	Miskin	4
4	Nelayan	< Rp.	6	Miskin	6

		600 rb.			
5	Petani	< Rp. 600 rb.	1	Miskin	1
6	Supir Angkot	< Rp. 600 rb.	5	Miskin	5
7	Tukang Becak	< Rp. 600 rb.	2	Miskin	2
8	Tukang Parkir	< Rp. 600 rb.	4	Miskin	4
9	Buruh	< Rp. 600 rb.	10	Miskin	10
10	Karyaw an	> Rp. 600 rb.	4	Tidak Miskin	4
11	Pedaga ng	> Rp. 600 rb.	6	Tidak Miskin	6
12	Wirasw asta	> Rp. 600 rb.	10	Tidak Miskin	10
13	Nelayan	> Rp. 600 rb.	1	Tidak Miskin	1
14	Supir Angkot	> Rp. 600 rb.	4	Tidak Miskin	4

15	Tukang Becak	> Rp. 600 rb.	9	Tidak Miskin	9
16	Tukang Ojek	> Rp. 600 rb.	2	Tidak Miskin	2
17	Tukang Parkir	> Rp. 600 rb.	1	Tidak Miskin	1
18	Buruh	> Rp. 600 rb.	13	Tidak Miskin	13
Jumlah			100	-	100

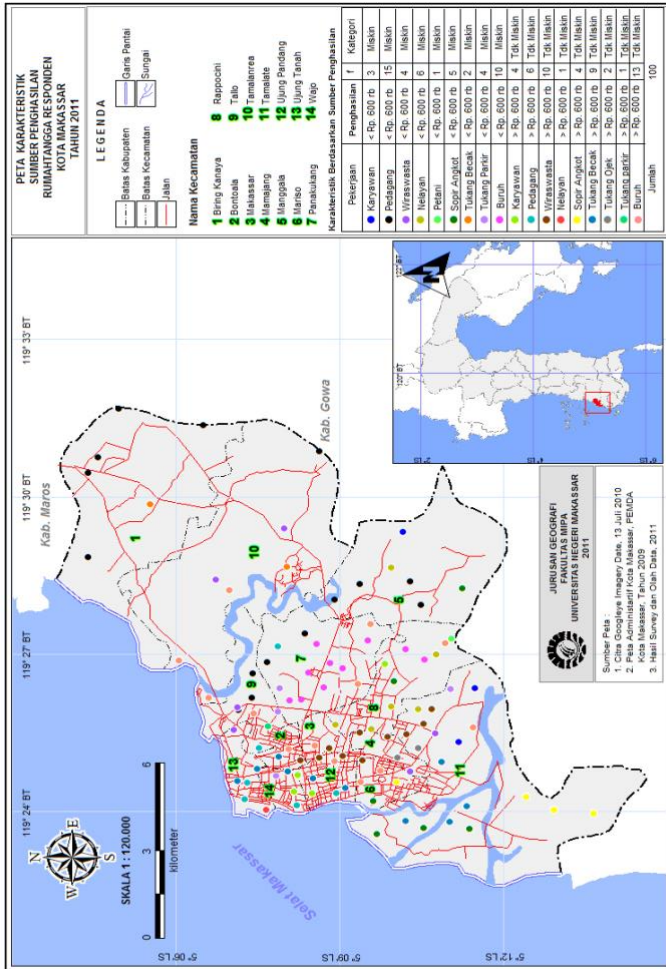
Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.23 Diagram Indikator Kemiskinan Sumber Penghasilan

Dari tabel di atas bahwa, dari 100 responden 50 KK diantaranya merupakan kategori miskin dimana mereka hanya bekerja sebagai karyawan, pedagang, wiraswasta, nelayan, petani, supir angkot, tukang becak, tukang parker dan buruh yang rata-rata penghasilannya hanya sekitar kurang dari Rp. 600.000 per bulan, sedangkan 50 % lainnya berada dalam kategori tidak

miskin dengan penghasilan lebih dari Rp. 600.000 per bulan. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. 6.24 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Sumber Penghasilan Rumah Tangga di Kota Makassar

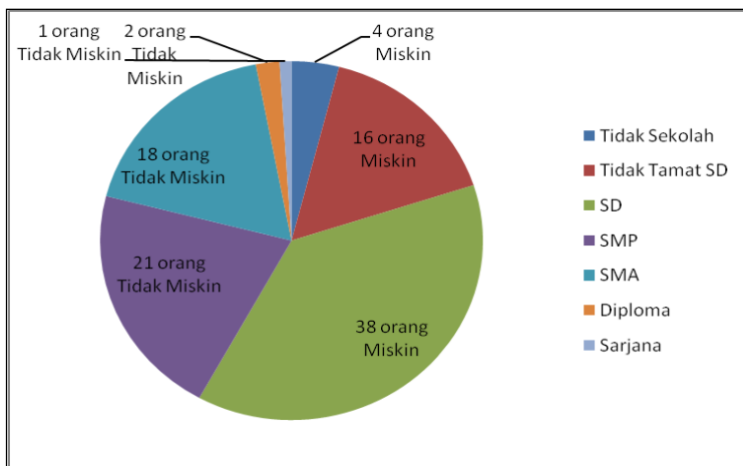
Tingkat Pendidikan

Indikator suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika tingkat pendidikan tertinggi kepala rumahtangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

No	Pendidikan Tertinggi	Frekuensi	Kategori	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	4	Miskin	4
2	Tidak Tamat SD	16	Miskin	16
3	SD	38	Miskin	38
4	SMP	21	Tidak Miskin	21
5	SMA	18	Tidak	18

			Miskin	
6	Diploma	2	Tidak Miskin	2
7	Sarjana	1	Tidak Miskin	1
Jumlah		100	-	100

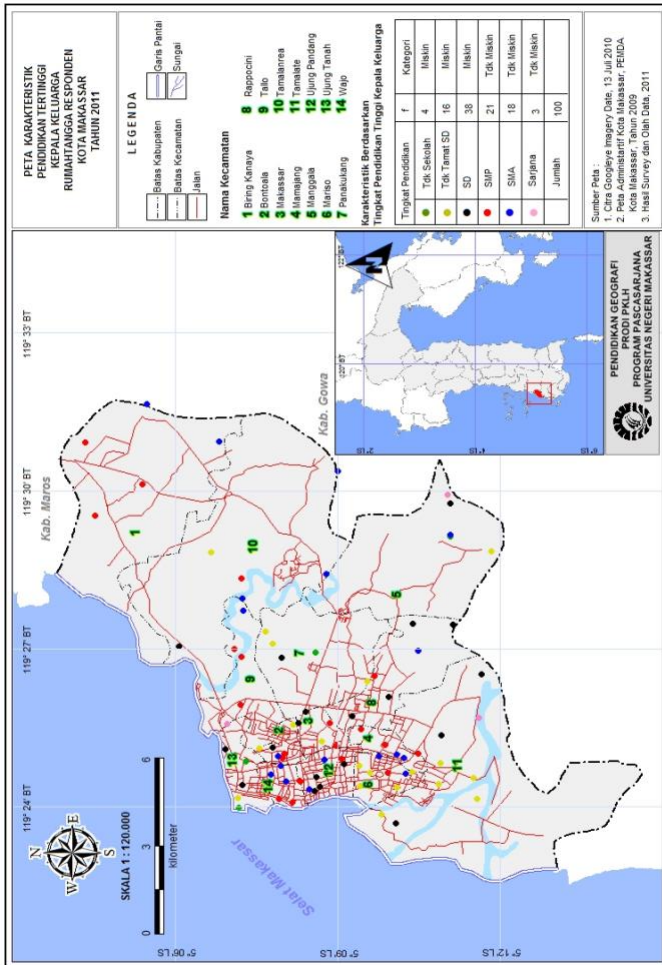
Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.25 Diagram Indikator Kemiskinan Tingkat Pendidikan

Dari tabel di atas bahwa, dari 100 responden 58 KK diantaranya merupakan kategori miskin tingkat

pendidikan tertinggi kepala rumahtangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut.



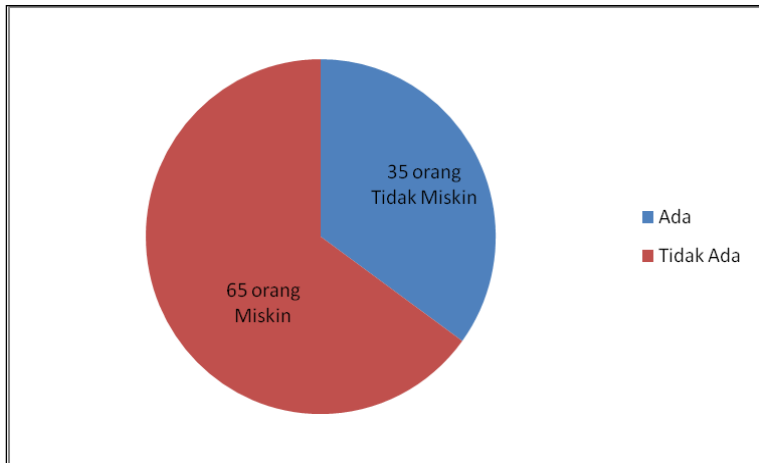
Gambar. 6.26 Peta Distribusi Indikator Kemiskinan Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga di Kota Makassar

Tabungan

Indikator suatu rumahtangga dikatakan miskin ketika tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak atau barang modal lainnya, adapun kondisi kemiskinan di Kota Makassar menurut indikator dan perbandingannya dapat dilihat pada diagram berikut:

No	Tabun gan	Frekuen si	Kategori	Persentase (%)
1	Ada	35	Tidak Miskin	35
2	Tidak Ada	65	Miskin	65
Jumlah		100	-	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011



Gambar 6.27 Diagram Indikator Kemiskinan Tabungan

Dari tabel di atas bahwa, dari 100 responden 65 KK diantaranya merupakan kategori miskin dimana mereka ketika tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak atau barang modal lainnya, sedangkan 35 KK lainnya berada dalam kategori tidak miskin. secara keruangan dapat dilihat pada gambar berikut

DISTRIBUSI MASYARAKAT MISKIN KOTA MAKASSAR

BAB VII

Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh BPS dalam Sensus Penduduk 2010 dan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT), yang menyatakan bahwa suatu rumahtangga dikatakan miskin apabila satu (1) saja dari ke empat belas (14) indikator ini terpenuhi, maka suatu rumahtangga dikategorikan kedalam rumahtangga miskin.

Perbandingan kategori rumahtangga miskin menurut 14 indikator di atas secara keseluruhan dapat dilihat secara jelas pada tabel berikut ini:

Kategori Kemiskinan berdasarkan 14 Indikator

No	Indikator kemiskinan	Kategori Rumahtangga	
		Miskin (KK)	Tidak Miskin (KK)
1	Luas lantai bangunan rumah	53	47
2	Jenis lantai bangunan rumah	27	73
3	Jenis dinding bangunan rumah	61	39
4	Fasilitas buang air besar	13	87
5	Sumber penerangan rumahtangga	9	91
6	Sumber air minum	32	68
7	Bahan bakar untuk memasak	31	69

8	Mengonsumsi daging, susu atau ayam	85	15
9	Belanja/membeli pakaian baru	52	48
10	Banyaknya jumlah kali makan	38	62
11	Kesanggupan membayar biaya pengobatan	64	36
12	Sumber dan jumlah penghasilan kepala rumatangga	50	50
13	Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga	58	42
14	Tabungan/barang yang mudah dijual	65	35

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

Tabel di atas menunjukkan kebanyakan rumahtangga tergolong miskin pada indikator konsumsi daging, susu atau ayam dan belanja/membeli pakaian baru yaitu masing-masing sebanyak 85 KK sedangkan

paling sedikit tergolong miskin pada indikator sumber penerangan rumah yaitu hanya 9 KK. Data perbandingan rumahtangga miskin untuk setiap Kecamatan juga disajikan berdasarkan 14 indikator/kriteria untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Rumahtangga Miskin tiap Indikator berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Indikator Kemiskinan Menurut BPS													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mari so	2	2	5	2	2	4	2	6	5	6	2	5	6	3
2	Mam ajan g	1	2	5	0	0	0	3	5	3	0	3	2	0	3
3	Tam alate	4	3	7	6	4	5	2	9	9	9	5	8	8	7
4	Rap poci ni	8	1	1	0	0	5	2	8	4	6	0	2	6	1
5	Mak	6	0	5	0	0	3	0	6	2	0	3	4	4	3

	assa r															
6	Ujun gpan dang	8	3	7	0	2	0	4	6	6	0	7	6	6	9	
7	Waj o	9	0	6	0	0	0	5	8	0	0	6	0	2	8	
8	Bont oala	1	2	0	0	0	3	0	9	1	9	9	9	6	9	
9	Ujun g Tan ah	2	1	4	0	0	1	4	6	3	0	6	6	6	6	
10	Tallo	4	4	6	2	1	1	2	6	6	2	6	5	2	5	
11	Pan akku kang	1	1	1	0	0	1	1	5	5	0	3	1	5	3	
12	Man ggal a	2	4	3	0	0	1	1	5	2	1	4	2	3	2	
13	Birin gkan ayya	1	1	6	0	0	3	4	4	1	4	4	4	1	1	

14	Tam alanr ea	4	3	5	3	0	5	1	2	5	1	6	4	3	5
Jumlah		5	2	6	1	9	3	3	8	5	3	6	5	5	6
		3	7	1	3		2	1	5	2	8	4	0	8	5

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

Berikut ini juga disediakan tabel jumlah rumahtangga responden yang tergolong kategori rumahtangga miskin berdasarkan jumlah indikator yang dipenuhi yaitu:

Kategori Kemiskinan berdasarkan Jumlah Indikator yang Dipenuhi oleh Rumahtangga Responden Kota Makassar

No	Jumlah Indikator terpenuhi	Jumlah Rumahtangga	Perse ntase %	Katego ri
1	0	4	4	Tidak Miskin
2	1	1	1	Miskin
3	2	2	2	Miskin
4	3	7	7	Miskin

5	4	6	6	Miskin
6	5	12	12	Miskin
7	6	16	16	Miskin
8	7	17	17	Miskin
9	8	13	13	Miskin
10	9	12	12	Miskin
11	10	4	4	Miskin
12	11	1	1	Miskin
13	12	2	2	Miskin
14	13	1	1	Miskin
15	14	2	2	Miskin
Jumlah		100	100	-

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 2011

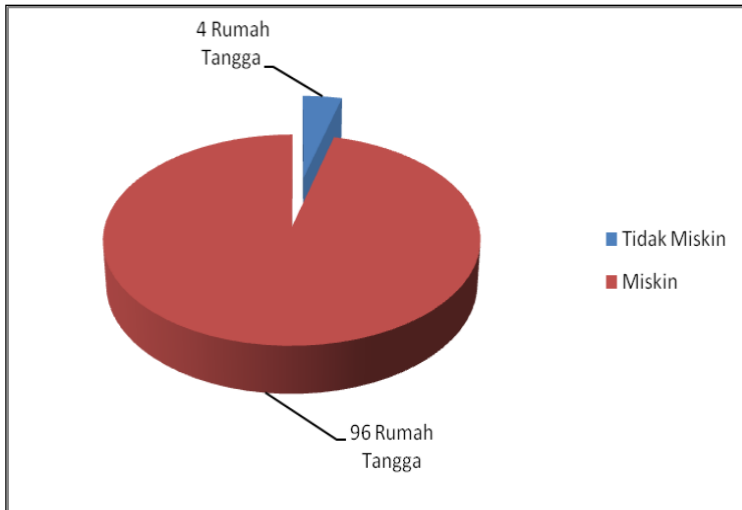
Data di atas menunjukkan bahwa meskipun suatu rumahtangga hanya memiliki atau masuk dalam 1 kriteria pada indikator tersebut, maka rumahtangga tersebut tergolong dalam rumahtangga miskin. Berikut ini adalah

jumlah rumahtangga miskin secara keseluruhan setelah dilakukan penggabungan dari 14 indikator :

Kategori Rumahtangga Miskin Kota Makassar

No	Kategori	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Tidak Miskin	4	4
2	Miskin	96	96
Jumlah		100	100

Sumber : Hasil olahan kuisisioner, 2011

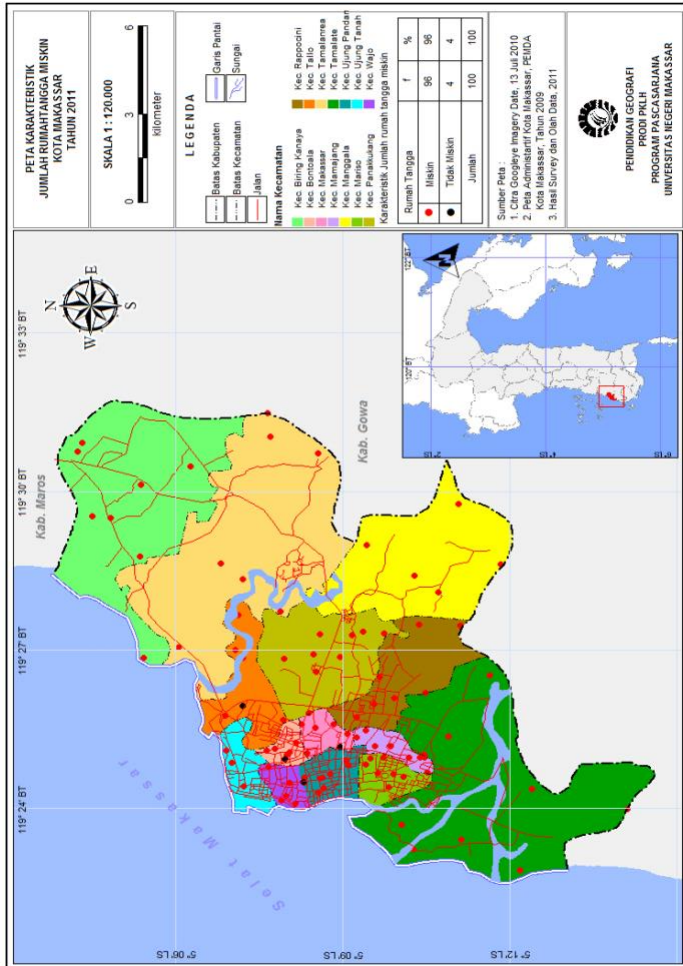


Gambar 7.1 Kategori Rumahtangga Miskin Kota Makassar

Data dan diagram di atas menjelaskan bahwa terdapat 96 rumah tangga atau 96% dari seluruh responden tergolong ke dalam rumahtangga miskin berdasarkan kriteria dari 14 indikator ini, selebihnya yaitu 4 rumah tangga atau 4% responden tergolong dalam rumahtangga tidak miskin.

Secara keruangan distribusi kategori rumah tangga miskin berdasarkan indikator yang ditetapkan

oleh Badan Pusat Statistik dalam menentukan penerima bantuan langsung tunai dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar. 7.2 Peta Distribusi Kategori Rumah Tangga Miskin di Kota Makassar

Salah satu karakteristik responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah jenis kelamin. Menurut Arman Saputra (2009:83) mengatakan Jenis kelamin kepala rumahtangga sangat mempengaruhi keadaan rumahtangga seseorang utamanya dalam bekerja, jenis kelamin kepala rumahtangga biasanya didominasi oleh laki-laki karena laki-laki dianggap bisa mengatur suatu keluarga dan memerankan semua pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Kepala rumahtangga di Kota Makassar sebanyak 80 orang merupakan laki-laki dan 20 orang adalah perempuan, adanya perempuan yang bertindak selaku kepala rumahtangga hal ini disebabkan karena suami mereka telah meninggal atau cerai. Berkaitan dengan masalah peranan wanita sebagai kepala rumahtangga, secara umum peranan wanita sebagai kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya biasanya akan mengalami

banyak kendala dibanding dengan peran laki-laki sebagai kepala rumahtangga (BPS 2007). Hal ini terkait dengan peran ganda wanita di dalam rumahtangga sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu yang melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya.

Karakteristik umur kepala rumahtangga juga penting dilihat karena usia dapat digunakan untuk melihat produktivitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga. Dalam bidang demografi, umur merupakan suatu variabel yang dapat berpengaruh terhadap komponen demografis, misalnya fertilitas, morbiditas, mortalitas dan lain sebagainya. Dilihat menurut umur, rata-rata umur kepala rumahtangga miskin yang paling banyak adalah yang berada pada kelompok umur lebih rendah dari 35 tahun, yaitu sebanyak 34 orang, kemudian usia 36 - 40 tahun sebanyak 22 orang. Jadi berdasarkan tingkatan kelompok umur kepala

rumahtangga ini, di kota Makassar masih didominasi angkatan kerja kepala rumahtangga tergolong muda.

Agama tentu saja merupakan salah satu variabel pengaruh yang penting. Dalam sebuah Hipotesis Karakteristik dikemukakan tentang bagaimana agama dapat mempengaruhi perbedaan fertilitas yang mampu menggambarkan perbedaan sosial-ekonomi antar penganut berbagai agama bahkan agama dianggap sebagai indikator pendidikan, pekerjaan, penghasilan, Kondisi Pemukiman dan mobilitas sosial. Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden rumahtangga miskin terdapat 90 orang yang beragama islam dan 10 orang yang beragama kristen.

Kepala rumahtangga di kota Makassar sebagian besar merupakan penduduk asli di kota tersebut yaitu sebesar 41 persen, sedangkan selebihnya berasal dari

kabupaten lain di pinggiran Kota Makassar yaitu Kabupaten Toraja, Maros, Pangkep, Sinjai, Gowa, Wajo, Sidrap, Takalar, Bone, Jeneponto dan Bulukumba serta di luar Pulau Sulawesi seperti Jawa, Muna dan Flores yang melaukan migrasi. Migrasi disini diukur dengan perpindahan penduduk dari tempat kelahiran ke lain daerah. Adanya penduduk dari luar daerah biasanya diakibatkan oleh penduduk tersebut ingin mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak di kota selain itu mereka juga dipindah tugaskan dari daerah asalnya bekerja, hingga akhirnya bermukim di daerah ini. Selain itu, dengan melihat daerah asal para kepala rumah tangga tersebut maka dapat diisimpulkan bahwa para responden terdiri atas suku Makassar, Bugis, Toraja, Flores, Jawa, Muna, dan Manado.

Banyaknya jumlah keluarga dan anak yang ditanggung oleh kepala rumahtangga sangat

mempengaruhi kondisi rumahtangga tersebut, karena semakin banyaknya jumlah keluarga atau anak yang ditanggung maka pengeluaran pun akan semakin bertambah begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden rumahtangga miskin dengan menggunakan kuesioner maka diperoleh jumlah keluarga yang menjadi tanggungan kepala rumahtangga di kota Makassar mayoritas kurang dari 5 orang yaitu sebanyak 57 orang responden dan yang paling sedikit di atas 7 orang yang hanya mencapai 7 orang. Sementara untuk jumlah anak yang paling banyak adalah di bawah 3 orang yaitu 57 orang responden dan yang paling sedikit yaitu 5 sampai 6 orang yang hanya mencapai 6 orang responden.

Guna mengetahui apakah masyarakat di kota Makassar dapat dikategorikan kepada masyarakat miskin maka perlu dilakukan analisis dengan

membandingkan antara karakteristik masyarakat setempat terhadap teori kemiskinan. Sehingga didapat karakteristik kemiskinan yang terdapat di permukiman kota makassar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Komonikasi dan Informatika terdapat 14 indikator dalam Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang dapat mengindikasikan masyarakat sebagai rumahtangga miskin di kota Makassar adalah sebagai berikut

Indikasi Rumahtangga Miskin di Kota Makassar

Indikasi Kemiskinan	Analisis	Kesimpulan
Luas Lantai Bagunan tempat tinggal	Ditinjau dari luas lantai bangunan tempat tinggal rumahtangga masyarakat di kota Makassar dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin, hal ini terlihat bahwa dari 100 responden 53 diantaranya	Masyarakat miskin dengan parameter memiliki bagunan rumah kurang dari 8 meter persegi dan rata-rata merupakan hasil warisan keluarga dan bukan dari hasil usaha

	memiliki luas bangunan rumah kurang dari 8 meter persegi yang diperoleh dengan mengetahui lebih awal luas rumah responden kemudian jumlah keluarga dalam satu kepala keluarga.	sendiri
Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Ditinjau dari jenis lantai bangunan tempat tinggal rumahtangga masyarakat di kota Makassar cukup baik, hal ini terlihat bahwa dari 100 responden 73 diantaranya menggunakan semen dan keramik sebagai lantai bangunan rumah, disamping terdapat pula sekitar 27 masyarakat yang menggunakan lantai bangunan dari	cukup dengan parameter banyak dari masyarakat yang menggunakan semen dan keramik sebagai jenis lantai bangunan tempat tinggal.

tanah, kayu murah,
dan kayu yang
berkualitas rendah.

Jenis dinding
bangunan tempat
tinggal

Ditinjau dari jenis
dinding bangunan
tempat tinggal
rumahtangga
masyarakat di kota
Makassar kurang
baik, hal ini terlihat
bahwa dari 100
responden 61
diantaranya
menggunakan
bambu, tembok
tanpa plester, dan
kayu murah
sebagai dinding
bagunan rumah,
disamping itu
terdapat pula
sekitar 39
masyarakat yang
menggunakan
dinding bagunan
dari tembok yang
diplester

Masyarakat
miskin dengan
parameter rata-
rata masyarakat
menggunakan
dinding
bangunan rumah
yang terbuat dari
tembok tanpa
plester, bambu
dan kayu
kualitas rendah
ketimbang
menggunakan
tembok yang
diplester yang
memerlukan
biaya yang
cukup mahal.

Fasilitas buang air besar	Ditinjau dari fasilitas buang air besar atau MCK (mandi cuci kakus) masyarakat di kota Makassar sudah memenuhi kebutuhan hal ini terlihat dengan adanya 87 orang dari 100 responden yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, disamping masih ada 13 orang yang memiliki kebiasaan membuang air besar pada sungai, pantai ataupun semak menyebabkan mereka tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri.	sudah memenuhi kebutuhan dengan parameter banyak dari masyarakat yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, meskipun ada juga sebagian kecil yang masih mempunyai kebiasaan buang air besar di sungai atau pantai.
---------------------------	---	--

Sumber penerangan rumahatangga	Ditinjau dari sumber penerangan rumahatangga, maka masyarakat di kota Makassar sudah memenuhi kebutuhan hal ini terlihat dengan adanya 91 orang dari 100 responden yang memiliki sumber penerangan menggunakan listrik meskipun memiliki daya yang masih sangat rendah yang hanya mampu digunakan untuk penerangan lampu saja tidak untuk keperluan alat-alat rumahtangga yang membutuhkan listrik seperti dispenser, kompor listrik, dan sebagainya. Selain itu terdapat pula 9 orang yang menggunakan pelita dan strongkeng sebagai sumber penerangan	sudah memenuhi kebutuhan dengan parameter bahwa hampir semua penduduk di wilayah kota Makassar menggunakan listrik sebagai sumber penerangan meskipun dengan daya yang sangat terbatas,
--------------------------------	---	---

karena daerahnya yang tidak memiliki jaringan listrik karena merupakan daerah ujung pemukiman dan kebanyakan merupakan lahan tambak.

Sumber air minum

Ditinjau dari sumber air minum, pemukiman penduduk di kota Makassar memiliki pelayanan sumber air bersih menggunakan PDAM yaitu sekitar 68 persen dari 100 responden yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kota Makassar, bahkan 32 orang responden masih menggunakan

memenuhi kebutuhan air bersih dengan parameter sebagian besar penduduk telah menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih.

sumur dan air hujan sebagai sumber air bersih, hal ini dikarenakan mahalnya beban yang harus dibayar oleh para pengguna PDAM.

Sumber bahan bakar

Ditinjau dari sumber bahan bakar yang digunakan, 69 orang responden masyarakat kota Makassar menggunakan gas sebagai sumber bahan bakar. Hal ini merupakan dampak dari adanya program kompersi minyak tanah ke gas yang dicanangkan oleh pemerintah, tetapi hal tersebut tidak langsung mengarahkan masyarakat memakai gas sebagai sumber bahan bakar tetapi

cukup dengan parameter banyak dari masyarakat yang menggunakan gas sebagai sumber bahan bakar akibat adanya program kompersi minyak tanah ke gas.

ada juga 31 orang yang masih menggunakan kayu dan minyak tanah.

Konsumsi daging atau susu	Indikator ini mengkategorikan suatu rumahtangga kedalam kriteria miskin apabila hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam hanya satu kali dalam seminggu atau kurang dari satu kali seminggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumahtangga miskin berdasarkan indikator ini sebesar 85 rumahtangga atau lebih dari separuh total	Masyarakat miskin dengan parameter rata-rata masyarakat kota Makassar hanya mengonsumsi daging, susu dan ayam 1 minggu atau kurang dari 1 kali seminggu karena penghasilan yang mereka peroleh hanya mampu untuk membeli beras saja.
---------------------------	---	--

	keseluruhan responden, rata-rata dari mereka mengkonsumsi daging, susu atau ayam hanya 1 kali atau kurang dari 1 kali seminggu	
Belanja pakaian	Rumahtangga miskin berikutnya apabila suatu rumahtangga memiliki indikator atau kriteria hanya berbelanja/membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Berdasarkan indikator ini ada sebanyak 52 rumahtangga atau lebih dari separuh total keseluruhan responden, rata-rata dari mereka hanya membeli 1 stel atau kurang dari 1 stel pakaian baru setahun	Masyarakat miskin dengan parameter lebih dari 50 persen masyarakat kota Makassar hanya mampu membeli pakaian karena penghasilan yang mereka peroleh membeli 1 stel atau kurang dari 1 stel pakaian baru setahun, itupun pada saat mendekati hari raya keagamaan.

Kesanggupan
makan

Suatu rumahtangga dikategorikan miskin menurut indikator ini apabila hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumahtangga miskin berdasarkan indikator ini sebesar 38 rumahtangga atau kurang dari separuh dari total keseluruhan responden, rata-rata dari mereka makan dua kali sehari

cukup dengan parameter banyak dari masyarakat yang mampu makan dalam tiga kali dalam sehari, mampu disini diartikan sebagai kesanggupan menyediakan bahan makanan sehari-hari.

Kesanggupan
membayar biaya
pengobatan

suatu rumahtangga miskin ketika tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklini k jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.

tingkat kesanggupan masyarakat membayar biaya pengobatan di puskesmas masih rendah dengan parameter

	Rumahtangga miskin menurut indikator ini sebanyak 36 rumahtangga, hal ini disebabkan oleh mahalny biaya pengobatan sehingga masyarakat jarang berobat ke dokter atau puskesmas.	frekuensi masyarakat berobat jarang, dan kesadaran akan pentingnya kesehatan sangat kurang.
Sumber penghasilan	Rumahtangga dikategorikan miskin menurut indikator ini apabila sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. Dari hasil penelitian terdapat 50	Masyarakat miskin dengan parameter penghasilan kepala rumahtangga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anggota rumahtangga yang memiliki jumlah tanggungan yang banyak dalam lingkungan rumahtangganya .

rumah tangga miskin dari total responden di Kota Makassar dengan sumber penghasilan yang memiliki upah/gaji dibawah Rp 600.000 per bulan, apalagi tiap-tiap keluarga pada masyarakat rata-rata memiliki 3-4 orang anak menyebabkan penghasilan tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah tanggungan

Pendidikan	Kriteria kemiskinan menurut indikator ini apabila pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD. Dari hasil penelitian terdapat 58 rumah tangga	Miskin ilmu pengetahuan dengan parameter mayoritas penduduk hanya lulusan SD, tingkat kesadaran masyarakat untuk
------------	---	--

	responden di Kota Makassar tergolong miskin, 4 KK yang tidak sekolah 38 KK hanya mengenyam pendidikan sampai SD dan 14 KK yang tidak tamat SD.	mengenyam pendidikan sangat rendah padahal sudah ada sekolah gratis, dan fasilitas sarana pendidikan sudah banyak yang tersedia.
Tabungan	suatu rumahtangga dikategorikan miskin diukur dengan tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, motor, atau barang modal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 65 rumahtangga miskin dari keseluruhan	Masyarakat miskin dengan parameter tidak ada tabungan yang dapat disisihkan dari hasil pekerjaan pokok, penghasilan masyarakat hanya mampu untuk membeli kebutuhan makan dan minum setiap harinya.

responden.

Sumber : Hasil Analisis Data, 2011

Berdasarkan kondisi di atas dengan memperhatikan indikator utama kemiskinan, maka sebagian besar masyarakat di permukiman Kota Makassar mengalami kemiskinan. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya 96 rumahtangga miskin dari total responden .Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi luas bangunan rumah, jenis lantai bangunan, jenis dinding bangunan, fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga, sumber air minum, bahan bakar, konsumsi daging, belanja pakaian, keasanggupan makan, kesanggupan membayar biaya pengobatan, penghasilan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan, dan

tabungan. Indikator ini dapat menentukan pola kemiskinan yang terdapat di kota Makassar.

Berdasarkan karakteristik masyarakat di kota Makassar yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner, maka pola kemiskinan yang sesuai di kota Makassar, adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan absolut karena rata-rata tingkat pendapatan masyarakat di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terlihat dari hasil penelitian terdapat 50 rumahtangga miskin dari total responden di Kota Makassar dengan sumber penghasilan yang memiliki upah/gaji dibawah Rp 600.000 per bulan, apalagi tiap-tiap

keluarga pada masyarakat rata-rata memiliki 3-4 orang anak menyebabkan penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja dikarenakan karena tingginya beban tanggungan.

- b. Kemiskinan Relatif karena pendapatan masyarakat responden yang sudah diatas garis kemiskinan yang berjumlah 50 orang dari 100 responden, masih saja memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Hal ini diakibatkan oleh pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan

masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

- c. Kemiskinan kultural karena sikap masyarakat miskin di kota Makassar yang cenderung fatalis (disebabkan oleh faktor budaya) atau tidak mau berurusan untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Hal ini ditandai dengan adanya program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah kota Makassar tidak mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat utamanya keterlibatan atau partisipasi keikutsertaan di sekolah meskipun sudah digratiskan.

Selain itu, terdapat juga pola kemiskinan yang sesuai di kota Makassar yang diperoleh dengan

menganalisis hasil wawancara dan pengamatan dan dikaitkan dengan teori pola kemiskinan dari Max-neef sebagaimana yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka. Seara rinci pola kemiskinan tersebut dapat dirinci sebagai berikut

a. Kemiskinan sub-sistensi,

Permukiman kota Makassar mengalami kemiskinan sub- sistensi karena:

- 1) Sebagian besar masyarakat memiliki bangunan rumah yang terbuat dari bahan dasar lantai dan dinding rumah yang terbuat dari bambu, dan kayu kualitas rendah. Selain itu, tingkat kepadatan di permukiman masyarakat termasuk pada kategori yang sangat padat hal tersebut dapat dilihat pada jarak antara rumah

yang hanya berjarak sekitar 2- 5 meter ditambah lagi dengan luas lantai bangunan rumah yang kurang dari 8 meter persegi semakin memperjelas adanya kemiskinan di wilayah ini.

- 2) Ketersediaan fasilitas air bersih yang terdapat pada kawasan ini termasuk cukup baik dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih, namun ada juga warga masyarakat yang masih menggunakan sumur dan merupakan milik umum sehingga tidak menimbulkan keleluasaan bagi para penggunanya.
- 3) Dari segi pendapatan yang diperoleh maka sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi yang cukup baik, namun

sebagian masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut terlihat dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebanyak 50 orang responden di kota Makassar yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 600.000., perbulan.

- b. Kemiskinan perlindungan,
Permukiman kota Makassar mengalami kemiskinan perlindungan karena:
 - 1) Dilihat dari segi lingkungan maka kondisi perumahan di kota Makassar dapat dikategorikan tidak bagus. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, semak-semak, dan pantai yang menyebabkan

tingkat kebersihan pada wiyah tersebut tidak terjaga.

- 2) Dilihat dari perbandingan jumlah fasilitas MCK yang tersedia dengan jumlah perumahan penduduk maka jumlah sarana dan prasarana tersebut cukup terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya 87 orang responden yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri. Namun demikian masih ada juga masyarakat yang tidak memiliki fasilitas MCK dan menganggap bahwa kebutuhan mereka telah terpenuhi walaupun mereka menggunakan pantai, sungai maupun rawa-rawa untuk memenuhinya.
- 3) Kebanyakan rumah yang ditempati oleh responden bukan merupakan hak pribadi

meskipun tergolong milik pribadi. Hal ini dikarenakan kepemilikan atas tanah yang ditempati merupakan warisan dari orang tua atau milik orang lain yang mereka sewa. Selain itu banyak juga dari masyarakat yang menempati hunian liar yang tidak memiliki sertifikat.

c. Kemiskinan pemahaman,

Permukiman kota Makassar mengalami kemiskinan pemahaman karena:

- 1) Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat kota Makassar termasuk memperhatikan terlihat dari tingkat pendidikan responden umumnya hanya tamat SD. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan biaya antara pemenuhan kebutuhan akan pendidikan

dengan pendapatan yang kecil menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Disamping itu, kesadaran akan pentingnya keikutsertaan di sekolah masih sangat minim meskipun berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah namun tidak mampu untuk meningkatkan partisipasi keikutsertaan di sekolah.

- 2) Sifat pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat umumnya merupakan warisan turun temurun sehingga masyarakat tidak berniat melakukan perubahan dalam pekerjaannya. Misalnya saja melaut yang mereka anggap warisan dari nenek moyang yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Fenomena kemiskinan yang telah disebutkan di atas tidak membentuk pola kemiskinan partisipasi, kemiskinan identitas ataupun kemiskinan kebebasan, hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang berada di kota Makassar merupakan masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang berasal dari berbagai suku seperti Makassar, Jawa, Bugis, Toraja dan lain sebagainya. Walaupun terjadi perbedaan suku namun tidak menjadi kendala untuk melakukan interaksi sosial hal ini disebabkan oleh sifat terbuka masyarakat Makassar untuk menerima keberadaan suku lain.

Meskipun kemiskinan melanda sebagian besar masyarakat di pemukiman kota Makassar tapi tidaklah menjadi permasalahan yang berarti bagi mereka.

Kemiskinan tidak harus menjadi halangan untuk menikmati kebebasan.

FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI MAKASSAR

BAB

VIII

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Makassar dapat disimpulkan dari 14 indikator pengkategorian kemiskinan serta hasil wawancara dan observasi di lapangan, adapun faktor-faktor kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor individu (rumahtangga) itu sendirilah yang menyebabkan kemiskinan bagi dirinya sendiri, misalnya:

- 1) Keterbatasan karakter, kurang etos kerja: malas, takut menghadapi masa depan, kurang daya juang.
- 2) Keterbatasan pendidikan dan pengetahuan, ini dibuktikan masih banyaknya kepala keluarga yang hanya mengenyam pendidikan tertinggi SD bahkan ada sama sekali yang tidak tamat SD, sehingga masih adanya penduduk yang buta huruf.
- 3) Keterbatasan harta benda/ekonomi, tidak memiliki/minim aset, tabungan tidak ada, upah/gaji rendah (kurang dari Rp 600.000 per bulan), kurangnya lapangan kerja, tidak punya modal untuk memulai usaha, jaringan kredit yang tidak mudah, tidak mampu mengisi sektor kerja yang lebih formal, dan pekerjaan yang tidak tetap.

- 4) Keterbatasan kesehatan, pangan yang tidak memenuhi kebutuhan fisik (2 x makan sehari), rumah yang tidak layak huni dan sempit (luas kuran 8 m²/orang, lingkungan perumahan yang tidak sehat (kumuh), fasilitas buang air besar yang tidak layak/pinggir kanal, listrik yang terbatas, air bersih terbatas; lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan (jarang konsumsi daging, susu dan ayam) sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka; bila sakit tak mampu berobat, bahkan anak sering sakit karena mengkonsumsi air yang tidak bersih
- 5) Keterbatasan keterampilan, rendah karena tidak memiliki biaya untuk mengikuti sekolah, kursus,

atau pelatihan yang menambah ketrampilan mereka.

- 6) Keterbatasan kasih sayang, kurangnya perhatian masyarakat lain atau tetangga karena budaya materialistik dan individualisme kota.
- 7) Keterbatasan keadilan, menjadi korban ketidakadilan oleh kelompok kaya, maupun oleh pemerintah. Karena sifatnya yang menjadi masalah/beban dan tidak produktif maka tidak memiliki daya tarik, daya tarik oleh perusahaan hanya dengan gaji rendah.
- 8) Keterbatasan penghargaan, tersingkirkan dari institusi masyarakat atau bahkan pemerintrah. Hanya sering dipolitisasi tapi jarang direalisasi perbaikan nasibnya.
- 9) Keterbatasan kekuasaan, suara jarang didengarkan secara berkelompok lebih-lebih

secara individu, tidak pandai dalam tawar menawar/tidak berdaya untuk memperjuangkan nasibnya/tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, tidak pernah menang dalam negosiasi ekonomi maupun lahan.

10) Keterbatasan keamanan, tinggal di lingkungan dengan akses jalan kebanyakan merupakan lorong/gang sempit, kumuh, jauh dari pengawasan Polisi sehingga tindak kejahatan dan perilaku menyimpan bisa saja terjadi.

11) Keterbatasan kebebasan, terhimpit persoalan hidup sehari-hari untuk mencari makan, terhimpit utang, tempat tinggal di tanah negara, lingkungan kumuh yang tidak sehat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah terjadinya kemiskinan disebabkan oleh-oleh faktor-faktor yang berada di luar diri dari orang tersebut.

- 1) Faktor usia, usia merupakan faktor eksternal yang alamiah, semakin menurunnya kemampuan kerja kepala rumahtangga karena usia bertambah dan sakit.
- 2) Faktor ekonomi, kurangnya lapangan kerja utamanya bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan dan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
- 3) Faktor Geografi, ditandai dengan sudah menurunnya produktivitas dan luas lahan pertanian dan tambak karena semakin bertambahnya permukiman dan nelayan semakin susah mencari ikan karena semakin banyaknya pencemaran dan cuaca yang ekstrim

- 4) Faktor Sosial, arus urbanisasi yang semakin meningkat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidi., 2007. *Mengeliminir kemiskinan Melalui Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Kualitas SDM.* Jurnal Pembangunan Manusia. Jakarta.
- Arman Saputra., 2010. *Distribusi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar.* Skripsi Jurusan Geografi FMIPA UNM. Makassar.
- Atmojo, SM., Syarif Hidayat, D. Sukandar., M. Latifah. 1995. *Laporan Studi Identifikasi Daerah rawan Pangan. Proyek Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi Departemen Pertanian – Jurusan GMSK, Fakultas Pertanian – IPB. Bogor.*
- Bank Dunia. 1990. *Indonesia: Poverty Assessment and Strategy Report. Report, No. 8034-IND, Country Department III East Asia and Pacific Region. Washington.*
- Bappenas. 2002. *Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 1996-2001, hal 3-8. Jakarta.*
- Biro Pusat Statistik. 2002. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia. BPS. Jakarta.*

- Chambers, R. 1987 . *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*” Jakarta .LP3ES.
- Darwis, V. dan A.R. Nurmanaf. 2001. *Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang*. FAE, Volume 19, No. 1, Juli 2001: 55-67.
- Duclos, Y.J. and A. Araar. 2004. *Poverty and Equity: Measurement, Policy and Estimation with DAD*. Theoretical Document in DAD: Distributive Analysis Special Edition for The PMMA Advanced Training Workshops. Dakar, Senegal, 10-14 Juni 2004.
- Foster, J., J. Greer and E. Thorbecke. 1984. *A Class of Decomposable Poverty Measurement*. *Econometrica*, 52 (3): 761-766.
- Friedman, J. 1979. *Urban Poverty in America Latin, Some Theoretical Considerations*, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (ed). 1986. *Kemiskinan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hardinsyah & D. Martianto. 1992. *Gizi Terapan*. PAU Pangan dan Gizi IPB, Bogor.
- Haris, A dan Adika, N. 2002. *Dinamika Penduduk dan Pembangunan di Indonesia dari Perspektif Makro ke realitas Mikro*. Lesfi. Yokyakarta.

- Imam, H. 2003, Pengelolaan Kredit Mikro melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, BKKBN, Jakarta.
- Johnson, RA., dan DW. Wichern. 1988. Applied Multivariate Statistical Analysis. 2nd Edition. Prentice Hal, EnglewoodCliffs. New York.I.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. 2005. SNPK Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2003. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Legendre, L, dan P. Legendre. 1983. Numerical Ecology. Elsevier Scientific Publishing Company.
- Listyaningsih, U. 2004. Umi Listyaningsih, Dynamics Poorness in Yogyakarta: Analysis Data result of Indonesia domesticity aspect survey (in Indonesia Language), Yogyakarta: PSKK Gadjah Mada University.
- Mantra, IB. 2000. Demografi Umum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Maxwell S. Frankenberger TR. 1992. Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, A Technical Review. Rome: International Fund for Agricultural Development – United Nations Children

Fund.

- Muhilal, FJ & Hardinsyah. 1998. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. LIPI, Jakarta.
- Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever, 1982, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Jakarta: Rajawali.
- Nanga, M. 2006. Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Disertasi Doktor Tidak Dipublikasikan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ridlo, Muhammad Agung. 1990. Evaluasi Pemukiman Kembali (Resettlement) Masyarakat Miskin (Daerah Studi : permukiman YSS Mangunharjo dan Mayangsari di Kota Semarang). Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Teknik Planologi Universitas Islam Bandung.
- Rimbawan, 1999. Zat Gizi dan kaitanya dengan keamanan Pangan. Dalam : Kumpulan Materi Pelatihan Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Staf Pengajar. Bogor: PSPG-IPB dan DEPDIKBUD.
- Sajogjo. 1994. Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa. C.V. Rajawali, Jakarta.

- Sajogyo. 1988. Masalah Kemiskinan di Indonesia. Antara Teori dan Praktek. Mimbar Sosek Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Seivilla,CG. 1993. Alimuddin T.(Penerjemah). Pengantar Metode Penelitian. UI PRESS. Jakarta.
- Sediaoetama, AD. 1985. Ilmu Gizi untuk Profesi dan mahasiswa. Jilid I. Dian Rakyat. Jakarta.
- Siegel, S., 1956. Nonparametric Statistics, for The Behavioral Sciences. McGraw-Hill Book Company. New York
- Singarimbun. 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
- Sumarwan, U. 1993. Identifikasi Indikator dan Variabel serta Kelompok Sasaran dan Wilayah Rawan Pangan Nasional. Kerjasama Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan UNICEF dan Biro Perencanaan Departemen Pertanian.
- Suharto, Bahar. 1993. Pengertian, Fungsi, Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah. : Tarsito. Bandung.
- Sumarwan, U., dan D. Sukandar. 2001. Kajian Indikator

Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga di Propinsi Jawa Tengah. Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi – Lembaga Penelitian IPB. Bogor.

- Suparlan, Parsudi (ed). 1984. Kemiskinan di Perkotaan Untuk Antropologi. Yayasan Obor Indonesia-Sinar Harapan. Jakarta.
- Syaefudin, dkk. 2003. Menuju Masyarakat Mandiri. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tambunan, TTH. 2001 Industrialisasi di Negara Sedang berkembang, Kasus di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tauran. 2000. Studi Profil Anak Jalanan Sebagai Upaya Perumusan Model Kebijakan Penanggulangannya. (Suatu Studi Terhadap Profil Anak Jalanan di Terminal Bus Tanjung Priok Kota Jakarta Utara). Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No.1, September 2000.
- Todaro, Michael, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid I. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Yasa, IGWM. 2008. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali. INPUT, Jurnal Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Yusdja, Y., E. Basuno, M. Ariani, dan T.B. Purwantini. 2003. Kebijakan Sistem Usaha Pertanian dan Program Kemiskinan dalam Mendukung

Pengentasan Kemiskinan Petani. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

- Zar, JH. 1985. *Biostatistical Analysis*. 2nd Edition. Prentice-Hal International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Zeitlin M, dan L. Brown. 1990. *Household Nutrition Security: A Development Dilema.: Food Agricultural Organization*. Roma.
- Zulkifli, H. 1993. *Pendidikan, Investasi dan Pembangunan*. Pusat Informatik Balitbang Dikbud. Jakarta.
- Yudhoyono, SB. dan Harniati. 2004. *Pengurangan Kemiskinan di Indonesia: Mengapa Tidak Cukup dengan Memacu Pertumbuhan Ekonomi*. Brighten Press, Bogor.

RIWAYAT HIDUP



Rusman Rasyid lahir di Sidomulyo Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 Oktober 1986 dari sebuah keluarga kecil pasangan P. Abd. Rasyid dan P. Nurasia. Memulai pendidikan formal pada tahun 1993 di SDN 29 Duampanua Pinrang dan tamat pada tahun 1999. kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang Namun pada tahun 2003 pindah sekolah di SMA Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SPMB dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar dan tamat sebagai Wisudawan Terbaik UNM tahun 2009. Pada tahun yang sama melanjutkan studi di Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) konsentrasi Pendidikan Geografi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Sejak tahun 2012 sampai sekarang menjadi Tenaga Edukatif (Dosen) pada program studi Pendidikan Geografi Universitas Khairun Ternate Propinsi Maluku

Utara dengan tugas mengasuh matakuliah Geografi Penduduk, Geografi Sosial, Teknik Demografi dan Geografi Ekonomi. Selama menjadi dosen, penulis aktif dalam menulis beberapa karya ilmiah dan dipublikasikan baik melalui jurnal ilmiah maupun melalui prosiding nasional dan internasional, beberapa diantaranya *Analisis Kemiskinan di Kota Makassar (2013)*, *Analisis Pola Kemiskinan Masyarakat Bandar Makassar Negeri Sulawesi Selatan (2014)*, *Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara (2014)* dan *Analisis Karakteristik dan Tingkat Kekumuhan Pada Permukiman Kumuh Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara (2015)*.